

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI
PRAKTIK JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI
DIGITAL**

(Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

INDRIYAH LAILI ADKHAYATI
NIM. 162.111.095

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI
PRAKTIK JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI
DIGITAL**

(Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

INDRIYAH LAILI ADKHAYATI

NIM. 162.111.095

Surakarta, 24 September 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19680405 199403 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :INDRIYAH LAILI ADKHAYATI

NIM :162.111.095

PROGRAM STUDI :HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI DIGITAL (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 September 2020

Indriyah Laili Adkhayati
NIM.162.111.095

Dr. Abdul Aziz, M. Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Indriyah Laili .A.

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Indriyah Laili Adkhayati, NIM : 162.111.095 yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI DIGITAL (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 September 2020

Dosen pembimbing

Dr. Abdul Aziz, M. Ag.

NIP. 19680405 199403 1 004

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI
PRAKTIK JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI
DIGITAL**

(Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh :

INDRIYAH LAILI ADKHAYATI

NIM. 162.111.095

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari Selasa, 20 Oktober 2020 / 3 Rabiul Awal 1442 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I : Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag.,M.Ag

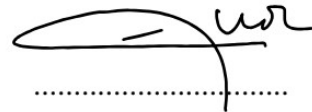
NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II : Anwaruddin, M.H

NIP. 19720812 200501 1 009

Penguji III : Fairuz Sabiq, M.S.i.

NIP. 19821108 200801 1 005



.....

.....

.....

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَ نُفُسِهِم يَخْسِرُونَ (3)

Artinya “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (QS: Al-Mutaffifiin;1-3)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepadaku dan dapat saya rasakan hingga saat ini, Dalam perjuanganku untuk mencari ilmu hingga lelah, Kupersembahkan karya skripsi ini kepada orang-orang terdekat yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Budi Murjoko dan Muryati, yang telah melahirkanku dan tak lelah membimbingku hingga tumbuh dewasa, tak lupa memberikan semangat dan doa agar kelak menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara.
2. Kakakku Nanang Legowo, Nunung Dwi Astuti, A.Md.Keb dan Anisa Tri Solikati, S.M yang selalu memberi motivasi agar menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s a	s/	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	h/	h/ (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	D{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fath{ah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Kata Transelitirasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ . . ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ . . ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ . . ي	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūla
4	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضه الأتفال	Raudah al-atfal/ Raudatul atfāl
2.	طلحة	Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbanā
2	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُل	Ar-rajulu
2	الْجَلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أَكَل	Akala

2	تأخذون	Ta'khudūna
3	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa mā muhamadun illa rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilang' maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin / Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mizāna / Fa auful- kaila wal mizana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI DIGITAL (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Abdul Aziz, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Kedua orang tuaku yang tersayang yang selalu memberikan doa, fasilitas sekolah, bimbingan dan arahan untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 September 2020

Penyusun

Indriyah Laili Adkhayati

NIM. 162.111.095

ABSTRAK

INDRIYAH LAILI ADKHAYATI, NIM: 162111095, “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI DIGITAL (Studi Kasus Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)”

Dalam Hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi 4 kriteria yaitu; sesuai rukun dan syarat jual beli, jujur, tidak mengandung gharar dan tidak ada unsur keterpaksaan. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 (c) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Namun pada kenyataannya, transaksi jual beli di Wilayah Kecamatan Kalikotes yang menggunakan mesin pertamini digital banyak penjual kurang menyadari tentang etika jual beli, maka banyak konsumen yang merasa dirugikan.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital di Kecamatan Kalikotes Klaten, bagaimana praktik tersebut ditinjau dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen atas jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital di Kecamatan Kalikotes Klaten.

Data penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif (*fieldresearch*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dari data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara langsung dengan penjual bbm Pertamina di Kecamatan Kalikotes, Klaten. Teknis analisis data menggunakan analisis interaktif, dan diproses melalui tiga komponen yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Praktik jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital di Kalikotes, Klaten dilakukan antara pembeli dan penjual, pembeli meminta sejumlah bbm dengan harga yang sudah disepakati lalu penjual mengambil selang *noozle* dengan memencet nominal yang sudah disepakati kemudian mengarahkan selang *noozle* ke tangki motor pembeli, setelah selesai pembeli menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakati. 2) Transaksi jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu rukun dan syarat yang ada dalam Hukum Islam, namun masih terdapat oknum (penjual) yang mengurangi takaran untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak serta masih rendahnya kesadaran penjual untuk bersikap jujur dalam kegiatan jual beli bbm tersebut. 3) Upaya dalam perlindungan konsumen dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan upaya hukum di luar pengadilan dan upaya hukum melalui pengadilan. Para pihak dapat memilih diantara kedua upaya tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli, Praktik Jual Beli, Hukum Islam.

ABSTRACT

Indriyah Laili Adkhayati, Nim: 162111095, "Review Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection Of The Practice Of Selling And Buying Bbm Using Digital First Machines (Case Study, Kalikotes District, Klaten Regency)"

In Islamic law, buying and selling transactions must meet 4 criteria, namely; according to the harmonious and buying and selling conditions, honest, does not contain gharar and there is no element of compulsion. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 8 (c) "Business actors are prohibited from producing and / or trading goods and / or services which do not correspond to the size, measurement, scale and quantity calculated according to the actual size. In fact, buying and selling transactions in the Kalikotes District area that use the first digital machines are less aware of the ethics of buying and selling, so many consumers feel disadvantaged.

The problems raised in this study are how the practice of buying and selling fuel using the first digital machine in Kalikotes Klaten District, how this practice is reviewed in Islamic Law and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the extent of legal protection for consumers for buying and selling fuel. using the first digital machine in Kalikotes Klaten District.

The research data used qualitative research methods (field research) with a qualitative approach. The data sources used were primary data and secondary data, with the data collection method, namely direct interviews with the Pertamina fuel seller in Kalikotes, Klaten. The data analysis technique used interactive analysis and was processed through three components, namely, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

This study concludes that 1) The practice of buying and selling fuel using the first digital machine in Kalikotes, Klaten is carried out between the buyer and the seller, the buyer asks for a certain amount of fuel at the agreed price then the seller takes the nozzle hose by pressing the agreed nominal then directs the nozzle hose to the tank the buyer's motorbike, after the buyer is finished handing over the agreed amount of money. 2) The sale and purchase of fuel using the first digital machine is in accordance with Islamic Law, but there are still people (sellers) who reduce the amount to get more profit and the seller's awareness is still low to be honest in the buying and selling of fuel. 3) Efforts in consumer protection can be pursued in 2 ways, namely through legal remedies outside the court and legal remedies through the courts. The parties can choose between the two efforts.

Keywords: buying and selling, buying and selling practices, Islamic law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR DIGRAM	xxv
DAFTAR SINGKATAN	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	24
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	32

BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Jual Beli.....	30
1. Pengertian	30

2. Dasar Hukum	31
3. Rukun Jual Beli	32
4. Hukum Jual Beli	33
5. Syarat Sah Jual Beli	34
6. Prinsip – Prinsip Jual Beli	35
7. Jual Beli Yang Dilarang	36
8. Gharar Dalam Jual Beli	38
B. Perlindungan Konsumen	39
1. Pengertian	39
2. Tujuan Perlindungan Konsumen	41
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen	42
4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	44
5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	46

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN

PERTAMINI

A. Sekilas Tentang Kecamatan Kalikotes.....	48
1. Letak Geografis.....	48
2. Keadaan Penduduk.....	49
3. Fasilitas Umum.....	50
a) Sarana Sekolah.....	50
b) Sarana Kesehatan.....	51
B. Gambaran Umum Tentang Pertamina	
1. Profil Pertamina.....	54
2. Macam – Macam Pertamina.....	56
3. Mekanisme Jual Beli Bbm Menggunakan Pertamina di Kecamatan Kalikotes, Klaten	58
4. Objek Transaksi	58
5. Tempat Pelaksanaan	59
6. Cara Menyimpan	59
7. Cara Mendapatkan Konsumen	59
8. Cara Ijab Qabul	60

9. Cara Menimbang/ Menakar.....	60
10.Cara Penetapan Harga.....	61
11.Cara Penyerahan Barang.....	61
12.Tanggapan Masyarakat.....	61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BBM

MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI

A. Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital di Kecamatan Kalikotes, Klaten.....	65
B. Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital ditinjau Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	76
C. Perlindungan Hukum Adanya Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital.....	86

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	98
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
-------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119
----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Kecamatan Kalikotes Menurut Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil 2018.....	50
Tabel 2	Jumlah Sekolah Kecamatan Kalikotes Tahun 2017 - 2018.....	50
Tabel 3	Jumlah Tenaga Medis Kecamatan Kalikotes Tahun 2017 - 2018.....	51
Tabel 4	Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Kalikotes Tahun 2017 - 2018.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hasil Pembelian 1 Liter Jenis Pertalite di kios Pertamina Ibu Tatik.....	71
Gambar 2	Hasil Pembelian 1 Liter Jenis Pertalite di kios Pertamina Ibu Marni.....	72
Gambar 3	Hasil Pembelian 1 Liter Jenis Pertalite di kios Pertamina Ibu Ningsih.....	73
Gambar 4	Hasil Pembelian 1 Liter Jenis Pertalite di kios Pertamina Bapak Heriyanto.....	73
Gambar 5	Hasil Pembelian 1 Liter Jenis Pertalite di kios Pertamina Ibu Sri Lestari.....	73
Gambar 6	Hasil Pembelian 5 tempat yaitu; Kios Pertamina Ibu Tatik, Ibu Marni, Ibu Ningsih, Bapak Heriyanto dan Kios Pertamina Ibu Sri Lestari	74

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Luas Area Budidaya Air Tawar Tahun 2017- 2019.....	49
-----------	---	----

DAFTAR SINGKATAN

BBM	: Bahan Bakar Minyak
<i>Home Industry</i>	: Perusahaan kecil/ rumah usaha produk barang
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<i>Noozle</i>	: Selang yang digunakan dalam penyaluran bbm
PDB	: Produk Domestic Bruto
Pertamini	: Salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak eceran yang tidak menggunakan botol melainkan suatu alat pompa manual atau dispenser seperti SPBU
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang Undang Dasar 1945
UUPK	: Undang Undang Perlindungan Konsumen
Universal	: Menyeluruh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biodata Narasumber	103
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	105
Lampiran 3	Foto/ Dokumentasi	113
Lampiran 4	Tabel Penelitian	118
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk sosial memiliki beberapa arti antara lain: manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Bertujuan agar manusia dapat bertahan hidup. Dijelaskan dalam QS: Al Hujurat (49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Yang Artinya :

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, agar kemudian jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui Maha teliti.” (QS: Al-Hujurat 49:13).¹

Kemudian dalam kegiatan bersosial manusia juga memerlukan aturan-aturan yang bertujuan mengikat manusia dalam berperilaku supaya tercipta ketentraman, keselarasan dalam bertahan hidup. Apabila manusia melanggar aturan, maka manusia tersebut harus menerima konsekuensi yang sudah ada.

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra), 2006., hlm 83.

Dalam aturan-aturan diatas, Islam memiliki aturan-aturan tersendiri yaitu Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan Allah SWT untuk keselamatan hamba-hambaNya baik didunia maupun diakhirat.² Hukum Islam bersifat universal, aturan yang ada pada Islam diperuntukkan bagi semua umat manusia tanpa terkecuali di seluruh dunia, namun dalam aturan tersebut lebih dikhususkan untuk kaum muslim / orang yang beragama Islam.

Seperti halnya dalam transaksi jual beli, jual beli yang benar menurut Hukum Islam adalah jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, jual beli yang jujur, jual beli yang tidak mengandung gharar serta jual beli yang tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak. Dalam QS.An-Nisa(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Yang Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa(4):29).³

Penjelasan ayat di atas, dimaksudkan pada transaksi jual beli harus dilakukan suka sama suka yang merupakan syarat sah jual beli, Oleh karena

² Muchammad Icshan, *Pengantar Hukum Islam*, cet, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015) , hlm 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra), 2006., hlm 83.

itu, tidak sah apabila jual beli dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu di antara dua pihak yang melaksanakan jual beli.⁴

Selain jual beli dilakukan dengan suka sama suka, jual beli harus menyangkut rukun-rukun jual beli, antara lain: adanya kedua belah pihak baik pembeli (orang yang membeli barang dengan alat tukar tertentu) dan penjual (orang yang menyediakan barang), ada objek akad/ harta benda yang akan dijual, dan lafal/ ucapan kesepakatan kedua belah pihak.⁵

Sedangkan transaksi jual beli yang benar menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen Pasal 8(c) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.” Apabila konsumen tidak mendapatkan haknya atas penjelasan pada pasal 8 (c) maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi berdasarkan penjelasan Pasal 19 (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”⁶

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan

⁴ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah (dalam Pandangan 4 Madzhab)*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah), 2014, hlm 11

⁵ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah (dalam Pandangan 4 Madzhab)*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah), 2014, hlm 3

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hlm 13.

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jual Beli bahan bakar minyak (BBM) merupakan transaksi jual beli dengan objek yaitu bahan bakar minyak (bbm) pada kendaraan bermotor, sedangkan dalam transaksi jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital merupakan transaksi kedua belah pihak baik penjual dan pembeli dengan objek barang berupa bahan bakar minyak (bbm) yang disimpan di Mesin Pertamina Digital sebagai bentuk inovasi baru dari beberapa bentuk penjualan bahan bakar minyak yaitu menggunakan botol eceran, menggunakan tangki pertamini manual, kemudian menggunakan mesin pertamini digital.

Berawal dengan penjualan bensin eceran menggunakan botol hingga seiring dengan perkembangan zaman menggunakan alat mesin yaitu pertamini atau pom mini. Keberadaan Pertamina sangat mendukung bagi kebutuhan masyarakat, selain dapat membantu ketika sedang di perjalanan jauh, adanya Pertamina/ SPBU yang lumayan jauh dapat membantu masyarakat yang tidak ingin mengantri di SPBU. Pertamina muncul seiring berkembangnya zaman, yang dahulu menggunakan botol eceran, berkembang lagi dengan pertamini menggunakan tangki yang sudah ada garis literan yang dikayuh dengan manual kemudian Pertamina digital yang sudah tertera harga serta takarannya.

Di era yang modern ini, banyak masyarakat berbondong-bondong mencari sebuah inovasi baru dalam kegiatan ekonomi, dari transaksi jual beli bbm yang awal mulanya menggunakan botol eceran dengan

perkembangan zaman kini menjual bbm berubah dengan menggunakan mesin pertamini digital yang dirasa lebih praktis dan simple dari sebelumnya.

Dalam transaksi jual beli di wilayah Kalikotes Klaten terdapat beberapa praktik jual beli bahan bakar minyak dengan menggunakan mesin Pertamina digital. Menurut salah satu pemilik mesin pertamini digital, ketika ditanya kenapa memilih usaha dengan menjual bahan bakar minyak dengan menggunakan mesin pertamini dikarenakan hasilnya yang menjanjikan, penggunaan mesin pertamini digital yang tidak ribet, praktis dan mudah, selain itu jauhnya SPBU membuat pemilik mesin menjadikan ladang usaha penjualan bbm menggunakan mesin pertamini tersebut.

Bahan bakar minyak (BBM) sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di Wilayah Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. Terbukti bertambahnya penduduk yang meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Kenaikan penduduk di Klaten menurut data terakhir pada tahun 2019 sebanyak 1.174.986 jiwa, untuk jumlah penduduk Kecamatan Kalikotes Klaten sendiri pada tahun 2019 sebanyak 36.734 jiwa dengan laju pertumbuhan PDB keseluruhan di kabupaten Klaten sebesar 0.31%. Dengan adanya jumlah penduduk tersebut membuat jumlah sepeda motor di wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi meningkat pada tahun 2017 menurut data di BPPD Jateng sebanyak 14.117.213 unit untuk kendaraan roda dua hingga tiga dan 1.715.394 unit untuk roda empat atau lebih. Meningkatnya kendaraan

bermotor tersebut menjadi ladang bagi masyarakat untuk menjual BBM sendiri.⁷

Sedikitnya tempat pengisian bahan bakar minyak besar baik milik pemerintah daerah maupun perusahaan resmi, seperti; Pertamina, Petronas, Total dan Shell dan jenis lainnya yang masih jarang. Di Klaten untuk jenis tempat pengisian bahan bakar terbanyak merupakan PT. Pertamina sebanyak 20 SPBU⁸, antara lain:

1. Pertamina SPBU Jonggrangan (Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Perangsangkal, Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57435)
2. SPBU Pertamina 4457414 (Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.4, Belangwetan, Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57436)
3. SPBU Pertamina 44.574.10 (Jalan Yogyakarta-Solo, Klepu, Ceper, Mondokan, Klepu, Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465)
4. SPBU Pertamina Cawas (Jalan Cawas, Cawas, Dusun II, Cawas, Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57463)
5. SPBU 44.574.06 Pertamina (Jl. Kartini, Krapyak, Merbung, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57424)
6. SPBU Pertamina 44.574.12 (Jl. Karangwuni pedan, KurungKidul, Kurunglor, Cetan, Kec. Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465)
7. Pertamina Kraguman Petrol Station (Jalan Raya Jogja, Kraguman, Jogonalan, Kraguman, Kec. Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57452)
8. SPBU 44.57405 Karang Delanggu (Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Kendon, Karang, Kec. Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57471)
9. Spbu Pertamina Jatinom (Jl. Raya Jatinom-Boyolali, Dusun I, Bonyokan, Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57481)
10. SPBU Pertamina 44.574.02 (Jl. Jogja - Solo, Baru, Meger, Kec. Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465)
11. SPBU Pertamina (Jl. Jend. Ahmad Yani, Senden, Danguran, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57425)

⁷ Data Kendaraan Bermotor 2017 dikuti dari <http://Bapenda.jateng.go.id> dan Badan Pusat Statistik (<http://Klatenkab.bps.go.id/>) Dilihat 11-6-2020.

⁸ Daftar SPBU Di Klaten dikutip dari <https://maps.google.com/> Dilihat 1-11-2020.

12. SPBU Pertamina (Jalan Klaten Jatinom, Kwaren, Ngawen, Dimoro, Jebugan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57433)
13. SPBU Pertamina 44.574.21 (Jl. Merbabu, Mlinjon, Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57412)
14. SPBU Terminal klaten 4457406 (South By Pass, Krapyak, Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57416)
15. SPBU Pertamina (Jawa Tengah, JL Raya Klaten - Delanggu , Mrisen , Juwiring , Klaten, Kali Winoko, Banaran, Delanggu, Klaten Regency, Central Java 57471)
16. Pertamina (Jl. Dr. Soeradji Tirtonegoro No.207, Tegalsari, Trunuh, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57421)
17. SPBU Pertamina 44.574.16 Kemudo (Jalan Raya Jogja - Solo, Sanggrahan, Prambanan, Kemudo, Prambanan, Tegalbarong, Kemudo, Kec. Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57454)
18. SPBU 44.574.26 (Jalan Klaten-Boyolali KM. 8, Gedaren, Jatinom, Surobayan, Gedaren, Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57481)
19. Pertamina (Dusun 1, Ngawen, Kec. Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57466)
20. SPBU Wonosari Trucuk (Majegan, Wonosari, Kec. Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57467)

Masih jarang nya tempat pengisian bahan bakar minyak (bbm) besar/ SPBU baik jenis Pertamina maupun jenis yang lainnya, Khususnya di Klaten untuk jenis SPBU selain Pertamina masih jarang bahkan tidak ada. Pertamina untuk Wilayah Kecamatan Kalikotes belum ada, jadi masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai peluang usaha untuk menjual bahan bakar minyak (bbm) atau salah satunya membuka usaha kios pertamini digital.⁹

Dengan adanya usaha penjualan mesin pertamini digital masyarakat yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, menjadikan masyarakat terutama penjual secara diam-diam untuk mencari/ menambah keuntungan dengan cara curang seperti mengurangi takaran. Meskipun hanya beberapa

⁹ Puji Hartatik, Pengusaha kios Pertamina Digital, *Wawancara*, Klaten, 20 April 2020

dari penjual, namun hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat maupun hukum positif.

Menjamurnya usaha menjual bahan bakar minyak menggunakan mesin pertamini digital/ pom mini di wilayah Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten menjadi alasan peneliti ingin mengkaji lebih jauh. Namun, adanya usaha tersebut masih terdapat penjual bahan bakar minyak yang menggunakan mesin pertamini masih terdapat beberapa penjual yang tidak memperhatikan takaran yang sesuai dan benar, baik itu kesalahan dari penjual yang mengurangi takaran maupun ketidakjelasan takaran di dalam mesin pertamini disebabkan karena pembeli tidak melihat langsung seberapa banyaknya bbm yang dialirkan ke tangki motor pembeli apakah sudah pas literannya atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai Takaran BBM di beberapa outlet mesin pertamini digital dan perlindungan konsumen secara hukum positif/ menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum islam dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten).*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Menggunakan Mesin Pertamina Digital yang terdapat di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten baik ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen?
3. Sejauh Mana Perlindungan Hukum Adanya Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak Menggunakan Mesin Pertamina Digital di Kecamatan Kalikotes?

C. Tujuan Pembahasan

Tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Mengetahui praktik jual beli bbm dengan menggunakan mesin pertamini digital di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui praktik jual beli bbm dengan menggunakan mesin pertamini digital di Kecamatan Kalikotes Klaten baik ditinjau dari Hukum Islam maupun Hukum Perlindungan Konsumen
3. Mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Transaksi Jual Beli Bbm Menggunakan Mesin Pertamina Digital di Kecamatan Kalikotes Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum (hukum positif maupun hukum Islam) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para akademisi, praktisi, dan penegak hukum untuk memperkaya referensi dan literature kepustakaan terkait dengan kajian atau pembelajaran mengenai Perlindungan Konsumen baik menurut Undang-Undang yang berlaku maupun Hukum Islam.
- b. Sebagai acuan bagi para pelaku usaha agar menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-undang dan sesuai Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat

serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.¹⁰

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).¹¹

Suatu bai' tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat;

- a) Saling rela antara kedua-belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya,
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya.
- c) Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual-membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d) Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya: khamr, rokok, alat musik, kaset lagu, video porno dll.

¹⁰ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, (Lamongan: Vol.III,No.2,2013), hlm. 60.

¹¹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah (dalam Pandangan 4 Madzhab)*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), hlm 7

- e) Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa, dll karena tidak dapat diserahkan.
- f) Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

Dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak (bbm) terdapat beberapa peraturan tentang bahan bakar minyak. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 (4) Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.¹²

Kegiatan jual beli bahan bakar minyak dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi disebut dengan Kegiatan Usaha Hilir. Dalam Pasal 1 (10) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.¹³

Kegiatan Usaha Hilir¹⁴, meliputi:

- a) kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar

¹² Pasal 1 – Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

¹³ Ibid.

¹⁴ Pasal 12 – Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;

- b) kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c) kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- d) kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak di Kalikotes terdapat beberapa jenis, antara lain:

- a) Jual Beli Bbm eceran menggunakan botol, merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan uang dengan objek jual beli bbm dengan menggunakan botol diisi dengan bbm tersebut, dengan cara dituangkan kedalam tangki motor menggunakan torong.
- b) Jual Beli Bbm eceran menggunakan pertamini manual, merupakan kegiatan jual beli bbm dengan menggunakan mesin pertamini manual

dengan dikayuh yang penyimpanan bbm berbentuk seperti tangki yang sudah ada garis literannya.

- c) Jual beli bbm menggunakan mesin pertamini, merupakan sebuah alat penyaluran bahan bakar minyak dengan inovasi baru setelah adanya pertamini manual. Tentunya dengan cara penggunaan yang lebih praktis, hemat tenaga karena sudah menggunakan listrik. Desain mesin pertamini digital sangat praktis dengan tampungan penyimpanan bahan bakar minyak yang tertutup menjadi satu box dengan mesin tersebut.

2. Hukum Islam

Di Indonesia, hukum islam merupakan salah satu sumber pengembangan hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum Barat. Dalam tata hukum Indonesia, Hukum Islam memiliki peluang konstitusional yang jelas. Menurut Hazairin, ahli hukum dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa pasal-pasal UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip antara lain tidak boleh dibuat peraturan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan negara berkewajiban menjalankan syariat agama-agama, yaitu syariat Islam bagi umat Islam, syariat Hindu bagi Hindu, dan syariat Nasrani bagi umat Nasrani.¹⁵

Menurut Juhaya S.Praja menjelaskan bahwa hukum islam, yaitu fiqih pada zaman awal Islam hingga masa Khulafa Rasyidin yang dibangun melalui proses ijtihad sekalipun para pakar ilmu ushul telah

¹⁵ Mustofa, dkk, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

sepakat bahwa pembuat dan sumber hukum dalam arti Al-Hakim adalah Allah semata, Pada perkembangan selanjutnya, pandangan seperti ini menampakkan sifat materi Hukum Islam antara wahyu dan ijtihad.¹⁶

Ciri-ciri hukum Islam dipaparkan secara detail oleh Mohammad Daud Ali, yakni sebagai berikut:

- a) Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam;
- b) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
- c) Mempunyai dua istilah kunci, yakni syariat dan fikih.
- d) Terdiri dari dua bidang utama, yakni ibadah dan muamalah dalam arti luas.
- e) Strukturnya berlapis, terdiri dari Al-Qur'an, sunah Nabi Muhammad, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa, pelaksanaannya dalam praktik berupa putusan hakim dan amalan umat Islam dalam masyarakat, serta di tataran legislasi tertuang dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan.
- f) Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- g) Dapat dibagi menjadi hukum taklifi, yakni al-ahkam al-khamsah berupa lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum (jaiz, sunah, makruh, wajib, dan haram) dan

¹⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 140-141.

hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.¹⁷

Dalam konteks bermuamalah, khususnya jual beli BBM menggunakan mesin Pertamina digital, masyarakat (penjual) dalam transaksi jual beli yang benar menurut Hukum Islam adalah jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, jual beli yang jujur, jual beli yang tidak mengandung gharar serta jual beli yang tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak. Dalam QS.An-Nisa(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

Yang Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa(4):29).¹⁸

Penjelasan ayat di atas, dimaksudkan pada transaksi jual beli harus dilakukan suka sama suka yang merupakan syarat sah jual beli, Oleh karena itu, tidak sah apabila jual beli dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu di antara dua pihak yang melaksanakan jual beli.¹⁹

¹⁷ Khotibul Umam, Modul 1 : Prinsip Dasar Hukum Islam, Universitas Terbuka Respository Dikutip dari <http://respository.ut.ac.id.>HKUM4408-MI/> Dilihat 3-11-2020.

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra), 2006., hlm 83.

¹⁹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah (dalam Pandangan 4 Madzhab)*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah), 2014, hlm 11

Selain jual beli dilakukan dengan suka sama suka, jual beli harus menyangkut rukun-rukun jual beli, antara lain: adanya kedua belah pihak baik pembeli (orang yang membeli barang dengan alat tukar tertentu) dan penjual (orang yang menyediakan barang), ada objek akad/ harta benda yang akan dijual, dan lafal/ ucapan kesepakatan kedua belah pihak.²⁰

Dalam Hukum Islam, ada beberapa kegiatan jual beli yang dilarang, antara lain:

a) *Bai' al-Ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Seperti menjual mutiara yang ada di dasar laut. Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna, kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas.

b) *Bai' Ma'juz al Taslim*

Akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Seperti menjual burung yang masih terbang bebas.

c) *Bai' Dain*

Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran. Atau piutang tersebut dijual kepada orang lain, seperti salwa memiliki piutang yang akan jatuh tempo sebulan mendatang, sebelum jatuh tempo piutang

²⁰ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah (dalam Pandangan 4 Madzhab)*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah), 2014, hlm 3

tersebut dijual najwa dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai piutang, transaksi ini juga identik dengan riba.

d) *Bai' al Gharar*

Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salahsatu pihak dan mendatangkan kerugian financial. Gharar dapat diartikan suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa di serahterimakan.

e) *Jual Beli Barang Najis*

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Menjual barang najis dan manfaatnya diperbolehkan, asal tidak untuk dikonsumsi. Menurut Malikiyah, tidak diperbolehkan menjual anjing, walaupun untuk penjagaan, menjual kotoran sapi, onta, domba sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman.²¹

Namun gharar dalam jual beli, ada beberapa yang diperbolehkan. Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada tiga macam:

- a) Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (ma'dum).

²¹ Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 82-89

- b) Desepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui.
- c) Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma'*, semua (yang demikian) ini diperbolehkan.

Ibnul Qayyim juga mengatakan : “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.

Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.²²

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan namun dengan catatan tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar

²² Jual Beli Gharar Yang Diperbolehkan, Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html/> diakses 04-11-2020.

gharar ini, dan tidak mungkin melepaskannya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.

3. Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris *consumer* atau *consumer/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consumer* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”²³

Konsumen menurut Pasal 1 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*).²⁴

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN), konsumen (konsumen akhir) diartikan sebagai “Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan”. Sedangkan Yayasan

²³ Masrukin, *Buku Daras (Hukum Perlindungan Konsumen)*, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2014), hlm. 15.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Permata Press, hlm. 2

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberi batasan tentang konsumen sebagai berikut, “Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.”²⁵

Sedangkan Perlindungan Konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika hak-hak yang dimilikinya telah dilanggar ataupun dirugikan oleh pelaku usaha.²⁶

Adapun beberapa hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah sebagai berikut: Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai

²⁵ Masrukin, *Buku Daras (Hukum Perlindungan Konsumen)*, (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2014) , hlm. 15-16.

²⁶ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 4.

kondisi dan jaminan barang dan/ jasa.²⁷ Dari beberapa hak tersebut masih banyak hak-hak lainnya yang dimiliki oleh konsumen.

Namun yang disayangkan adalah dari banyaknya hak konsumen yang ada, terdapat beberapa hak yang sering dikesampingkan oleh pelaku usaha seperti hak untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai barang yang dipesan dan hak untuk mendapat ganti rugi terhadap barang yang dipesan baik barang itu rusak, cacat atau barang tidak diterima oleh konsumen.²⁸

Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia. Sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁹

Dalam Pasal 8 ayat 1(c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan

²⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 51.

²⁸ Desy Ary Setyawati, dkk, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Jurnal, Banda Aceh Vol.1(3)pp.33-51, 2017, hlm.38.

²⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Anggota IKAPI: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 9.

ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”³⁰

Apabila terbukti ada penjual yang tidak melakukan usaha sesuai takaran dan timbangan berdasarkan Pasal 19 (1) UUPK yaitu

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Upaya yang dapat dilakukan ketika penjual tidak melakukan tanggung jawabnya yaitu pengusaha/ penjual berkewajiban memberikan ganti rugi.

Adapun upaya penyelesaian dalam perlindungan konsumen ada 2 macam, yaitu:

a) Upaya Hukum di Luar Pengadilan

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 47, Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali.³¹

Mengenai perkara pelanggaran konsumen yang diselesaikan secara perdata, gugatan dapat dilakukan melalui peradilan atau di luar peradilan. Apabila melalui peradilan, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah lingkungan peradilan. Apabila dilakukan di luar

³⁰ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³¹ Pasal 47, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

peradilan, maka gugatan dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).³²

b) Upaya Hukum Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan atau mengajukan gugatan melalui pengadilan dalam perkara konsumen mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan sedikit menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan diatas.

Pertama, sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga BBM Eceran di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.” Oleh Zian Ziana S (Mahasiswa dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta) Pada tahun 2020.

Dalam penelitian tersebut memaparkan kesimpulan yaitu ketidakadilan dalam penetapan harga yang diberikan penjual menurut sebagian masyarakat tidak adil namun ditinjau dalam Hukum Islam sudah sesuai karena sudah termasuk biaya pengangkutan dari pembelian bbm

³² Masrukin, Buku Daras (Hukum Perlindungan Konsumen), Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2014, hlm 61.

tersebut. Menurut peneliti skripsi tersebut sudah sesuai. Dengan perbedaan pada skripsi ini lebih menitikberatkan pada Hukum Islam, menggunakan objek yaitu BBM eceran, dan tempat penelitian yang berbeda.³³

Kedua, sebuah skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pertamina Yang Tidak Memiliki Peralatan Penyaluran Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Keselamatan Kerja.” Oleh Dika Farizal Utomo (Mahasiswa dari jurusan Hukum, fakultas Hukum, Universitas Jember) Pada tahun 2017.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bagaimana kesesuaian aturan mengenai pendirian Pertamina yang tidak memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja, Tanggung gugat konsumen terhadap penjual apabila konsumen merasa dirugikan, dengan kesimpulan yang sudah sesuai antara rumusan masalah dengan jawaban. Perbedaan skripsi mengenai peralatan yang tidak memenuhi teknis dan keselamatan kerja, dengan tinjauan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 mengenai syarat sebagai penyalur dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen, serta lokasi penelitian yang ada di Jember.³⁴

³³ Zian Ziana S, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga BBM Eceran di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta: 2020.

³⁴ Dika Farizal Utomo, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pertamina Yang Tidak Memiliki Peralatan Penyaluran Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Keselamatan Kerja*, Skripsi, Universitas Jember, Jember: 2018.

Ketiga, sebuah jurnal dengan judul “Penerapan Peraturan Bph Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/Pommini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018.” Oleh Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si dan H.Lukmanul Hakim, S.Ag.,M.Si (dari Prodi Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang) Pada tahun 2018.

Dalam jurnal tersebut menyimpulkan kewenangan dengan tugas BPH Migas dan aturan mengenai sub lembaga penyalur bbm tertentu maupun penugasan tertentu, dengan kesimpulan yang sudah sesuai. Pembeda dengan jurnal tersebut adalah payung hukum yang digunakan pada jurnal ini lebih menitikberatkan aturan pada BPH Migas Nomor 5 Tahun 2015, dan lebih membahas mengenai aturan untuk Pertamina seperti apa.³⁵

Keempat, jurnal lain dengan judul “Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Paropo Kota Makassar) “ Oleh Zaenal Arifin dan Thamrin Logowali (dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) pada tahun 2017.

Dalam penelitian tersebut mendiskripsikan tentang sistem jual beli bensin eceran dengan menggunakan takaran dengan sistem botol, bahwasanya isi bensin yang dimasukan dalam botol tidak penuh / hanya seleher botol, serta pada penelitian ini menjelaskan bagaimana perlindungan

³⁵ Dadan Kurniansyah dan Lukmanul Hakim, *Penerapan Peraturan Bph Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/Pommini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018*, Jurnal Politikum Indonesiana (Universitas Singaperbangsa Karawang) 2018.

konsumen bagi penjual yang mengurangi takaran bensin menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan kesimpulan yang sudah sesuai. Perbedaan dari jurnal ini adalah objek pada kegiatan jual beli tersebut menggunakan botol dalam penjualan bbm,³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.³⁷

b) Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi

³⁶ Zaenal Arifin dan Thamrin Logowali, *Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Paropo Kota Makassar*, Jurnal: UIN Alauddin Makassar, Makassar: 2017.

³⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm 21.

(gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian telah menekankan makna pada generalisasi.³⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan merupakan data primer maupun data sekunder. Antara lain:

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data langsung (asli) dengan tidak melalui perantara³⁹, mengenai Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital Studi Kasus di Kecamatan Kalikotes Klaten Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi narasumber adalah 5 (lima) penjual bbm menggunakan pertamini yaitu Ibu Tatik dengan kios diwilayah Prigi Wetan, Kecamatan Kalikotes Klaten, Ibu Sri Lestari dengan kios Pertamina di Gentongan, Kalikotes Klaten, Ibu Marni dengan kios Pertamina di Tambong Wetan, Kalikotes, Klaten, Ibu Ningsih dengan kios Pertamina di Tambong Kulon, Kalikotes, Klaten dan Bapak Heriyanto dengan kios Pertamina di Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Klaten. Kemudian peneliti mewawancarai 3 pembeli bbm Pertamina, yaitu:

³⁸ Ibid, 21.

³⁹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm 1.

Amri, Anita dan Samadi. Dan terakhir peneliti mewawancarai Pegawai SPBU yaitu Sdr. Iwan mengenai ketentuan pembelian bbm dengan jumlah banyak.

- b) Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti perpustakaan.⁴⁰ Dalam data perpustakaan hal yang perlu dilakukan yaitu melakukan indentifikasi buku-buku dan literasi yang berhubungan dengan jual beli. Buku-buku yang memenuhi syarat dan kriteria mengenai materi ruang lingkup hukum Islam, Hukum Perlindungan Konsumen. Sedangkan buku-buku yang bersifat melengkapi bagian-bagian tertentu saja seperti mengenai jual beli bbm pertamini yang disyariatkan Hukum Islam maupun Hukum Perlindungan konsumen.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kalikotes Klaten yang terdapat gerai Penjual BBM yang menggunakan mesin Pertamina antara lain:

- a) Prigi Wetan, Kelurahan Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
- b) Gentongan, Kelurahan Gemblegan, Kalikotes, Klaten
- c) Tambongwetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten
- d) Tambongkulon, Kecamatan Kalikotes, Klaten
- e) Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Klaten

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Komunisat, Alfabeta, 2008), hlm 402.

dilakukan pada tanggal 10 April – 20 Juni 2020 sejak 1 (satu) bulan proposal penelitian diterima.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis untuk keperluan penelitian ini adalah dengan teknik wawancara untuk memperoleh data primer, dan didukung dengan data dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.⁴¹ Adapun pihak-pihak yang berhubungan dengan wawancara disini merupakan 5 (lima) pihak penjual bbm yaitu: Ibu Tatik, Ibu Sri Lestari, Ibu Marni, Ibu Ningsih dan Bapak Heriyanto. (3) Pihak pembeli yaitu Amri, Anita dan Samadi dan pegawai SPBU Mas Iwan.

b. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui bukti-bukti. Sumber data pada dokumentasi dapat berupa foto mesin pertamini, foto pengecekan takaran, dan beberapa foto bbm yang merupakan bentuk pengurangan takaran, video maupun buku yang relevan dengan peneliti seperti Hukum Islam tentang jual beli, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁴¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm 138

Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan peneliti.⁴²

5. Teknik analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴³

Adapun setelah semua data terkumpul akan dianalisis dengan data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dengan demikian analisis data secara interaktif dilakukan dengan 3 komponen, antara lain:

- a) Reduksi data, merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlah yang cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting.⁴⁴
- b) Penyajian Data, adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami.⁴⁵ Setelah data dilakukan reduksi yang mana reduksi yang dilakukan pada wawancara dan penemuan-

⁴² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Pustaka Setia, 2012), hlm.141

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 244.

⁴⁴ Ibid. 239.

⁴⁵ Ibid. 370.

penemuan buku yang jumlahnya banyak maka dipilah-pilah mana informasi yang digunakan lebih penting kemudian dari pemilahan tersebut dilakukan penyajian data seperti argensi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai Praktik Jual Beli Bbm Menggunakan Mesin Pertaimini seperti apa.

- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah pengumpulan data pada kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas, dalam penulisan penelitian ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut:

Bab pertama, Sebagai pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, signifikasi penulisan (tujuan dan manfaat), kajian teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam, yang berisi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Jual Beli, Hukum Jual Beli, Jual Beli yang di larang, Jual Beli yang Sah dalam Islam, Jual Beli Gharar Yang diperbolehkan, Prinsip Jual Beli dan mengenai Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang Kecamatan Kalikotes yang berkaitan dengan letak geografis, keadaan penduduk, fasilitas umum dan gambaran umum Pertamina wilayah Kecamatan Kalikotes Klaten serta Mekanisme Jual Beli Bbm menggunakan Mesin Pertamina di Kecamatan Kalikotes Klaten, Objek transaksi, Tempat Pelaksanaan, Cara Menyimpan, Cara Mendapatkan Konsumen, Cara Ijab Qabul, Cara Menimbang/ Menakar, Cara Penetapan Harga, Cara Penyerahan Barang dan Tanggapan Masyarakat Mengenai Jual Beli Bbm Menggunakan Mesin Pertamina di Kecamatan Kalikotes, Klaten.

Bab keempat, bab ini berisi Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital Di kecamatan Kalikotes Klaten, analisis hukum islam dan perlindungan konsumen yang terjadi di Pertamina digital tersebut, serta Perlindungan Hukum terhadap konsumen mengenai praktik Jual Beli Bbm Menggunakan Mesin Pertamina Digital di Wilayah Kecamatan Kalikotes Klaten.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian atau jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pertama dan saran-saran yang diharapkan untuk memberikan

solusi dalam pembaharuan Hukum Islam khususnya dalam Praktik Jual Beli
BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital Dan Perlindungan Konsumen.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk melakukan transaksi tukar menukar barang atau tukar menukar dengan alat tukar yang dibenarkan menurut syara', Kegiatan ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Menurut bahasa arab yaitu al-ba'i artinya menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Sedangkan menurut terminologi jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/ menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/ membeli barang yang dijual).¹

Sedangkan dalam kitab Fiqih Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata al-Bai' (jual) dan asy-Syiraa' (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada

¹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 74.

kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.²

Menurut beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan jual beli yaitu kegiatan tukar menukar barang dengan alat pembayaran yang sepadan atau barang dengan barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengucap sighat atau ungkapan ijab dan qabul.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dalil dari AL-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Yang Artinya:

*“Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan Riba.”*³

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ج

Yang Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeji hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS.Al-Baqarah (2): 198).⁴

b. Dalil dari Sunnah

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الْبَيْعَانِ بِأَلْحَيْنَا رِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah.” (Riwayat al-Bukhari, Bab Idza Bayyana al-Bayyi’ani wa lam Yaktuma wa Nashaha, Kitab al-Ba’i, juz III, hlm 76)⁵

² Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, (Lamongan: Vol.III,No.2,2013), hlm. 60.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra), 2006., hlm 43.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*... hlm 43.

c. Dalil dari Ijma'

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya ba'i karena mengandung hikmah yang mendasar, yaitu setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya ba'i, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.⁶

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasanya semua syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofi (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofi di balik pembolehan ba'i. Diantaranya adalah sebagai media/ sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.⁷

3. Rukun Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).

- a. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.

⁵ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah (dalam Pandangan 4 Madzhab)*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), hlm 4

⁶ Ibid, hlm 5

⁷ Ibid,

- b. Ma'qud 'Alaihi (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.
- c. Shighat (ijab dan qabul) Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.

4. Hukum Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain. Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

- a. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
- b. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang.
- c. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
- d. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.

Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual

beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.⁸

5. Syarat Sah Jual Beli

Suatu bai' tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat;

- g) Saling rela antara kedua-belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya,
- h) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya.
- i) Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual-membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- j) Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya: khamr, rokok, alat musik, kaset lagu, video porno dll.
- k) Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa, dll karena tidak dapat diserahterimakan.
- l) Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

⁸ Safira Meliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 70 Semarang)*, Thesis S1: UIN Walisongo Semarang, 2016., hlm.30-31.

m) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual-beli dimana penjual mengatakan "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya".⁹

6. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Adapun prinsip-prinsip jual beli, sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian⁹. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya⁹.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

d. Tidak mubazir (boros, Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan

⁹ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Dosen Pasca Sarjana: Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, hlm. 99

keluarganya serta menafkahkanya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

- e. Kasih sayang, kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”.¹⁰

7. Jual Beli Yang Dilarang

Terdapat beberapa jual beli yang dilarang dalam islam menurut pandangan ulama fiqh, yaitu :

f) *Bai' al-Ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Seperti menjual mutiara yang ada di dasar laut. Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena objek akad tidak bisa di tentukan secara sempurna, kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas.

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press,2018), hlm. 34-35

g) *Bai' Ma'juz al Taslim*

Akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Seperti menjual burung yang masih terbang bebas.

h) *Bai' Dain*

Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran. Atau piutang tersebut dijual kepada orang lain, seperti salwa memiliki piutang yang akan jatuh tempo sebulan mendatang, sebelum jatuh tempo piutang tersebut dijual najwa dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai piutang, transaksi ini juga identik dengan riba.

i) *Bai' al Gharar*

Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salahsatu pihak dan mendatangkan kerugian financial. Gharar dapat diartikan suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa di serahterimakan.

j) *Jual Beli Barang Najis*

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Menjual barang najis dan manfaatnya diperbolehkan, asal tidak untuk dikonsumsi. Menurut Malikiyah, tidak diperbolehkan

menjual anjing, walaupun untuk penjagaan, menjual kotoran sapi, onta, domba sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman.¹¹

8. Gharar Dalam Jual Beli

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (bai' al-ma'dum). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul). Contoh: Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Contoh: Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.¹²

¹¹ Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 82-89

¹² Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal: Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, UIN Jakarta, 2009., hlm 57-59.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan.

Ibnul Qayyim juga mengatakan : “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.

Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.¹³

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan namun dengan catatan tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan

¹³ Jual Beli Gharar Yang Diperbolehkan, Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html/> diakses 04-11-2020.

konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Menurut Yusuf Sofie, perbedaan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen terletak pada objek yang dikaji. Hukum konsumen wilayah hukumnya lebih banyak menyangkut pada transaksi-transaksi konsumen (consumer transactions) antara pelaku usaha dan konsumen yang berobyekan barang dan/atau jasa. Sedangkan dalam hukum perlindungan konsumen, kajian mendalam terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut. Selanjutnya dalam hukum konsumen bukannya tidak ada perlindungan hukum terhadap konsumen, namun perlindungan hukumnya berwujud hak-hak dan/atau kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan perlindungan hukum dalam hukum perlindungan konsumen merupakan campur tangan negara untuk melindungi individu konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak jujur (unfair business practices).¹⁵

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999

¹⁴ Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah: Perlindungan Hukum Dan Konsumen*, (Tangerang: PSIP Nusantara Press, 2018), hlm 21.

¹⁵ Agus Suwandono, *Modul 1: Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Buku Materi Pokok BMP: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Terbuka, 2016., hlm 6.

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹⁶.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”¹⁷.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

¹⁶ Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah: Perlindungan Hukum Dan Konsumen...* hlm 21.

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Permata Press., hlm 2.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁸

3. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN), konsumen (konsumen akhir) diartikan sebagai “Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.”¹⁹

Hak konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

¹⁸ Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999*, Jurnal IUS: Institut Agama Islam Hamzarwadi (IAIH) NW Lombok Timur, Vol.III No.9, 2015, hlm 530.

¹⁹ Masrukin, *Buku Daras (Hukum Perlindungan Konsumen)*, Fakultas Syariah : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2014, hlm 15.

²⁰ Ibid, hlm 18

- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 sebagai berikut:²¹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

²¹ Ibid, hlm 19

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian Pelaku Usaha sebagai berikut

“Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”²²

Pengelola/pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pengelola adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Permata Press., hlm 3.

- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

Hak-hak pengelola diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

²³ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Permata Press., hlm 6.

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

²⁴ Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah: Perlindungan Hukum Dan Konsumen...* hlm 33.

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

²⁵ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Permata Press., hlm 7.

BAB III

JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI DIGITAL KECAMATAN KALIKOTES KABUPATEN KLATEN

A. Sekilas Tentang Kecamatan Kalikotes

1. Letak Geografis

Kecamatan Kalikotes merupakan wilayah bagian tengah Kabupaten Klaten, dengan luas 13 km³, jumlah penduduk 30.176 dan kepadatan 2.321 per km².¹ Dengan sebagian penduduknya bekerja sebagai pengusaha, salah satunya usaha dagang. Kecamatan Kalikotes sendiri terdiri dari beberapa kelurahan, diantara sebagai berikut:

- a. Kelurahan Gemblegan
- b. Kelurahan Jimbung
- c. Kelurahan Jogosetran
- d. Kelurahan Kalikotes
- e. Kelurahan Krajan
- f. Kelurahan Ngemplak
- g. Kelurahan Tambongwetan

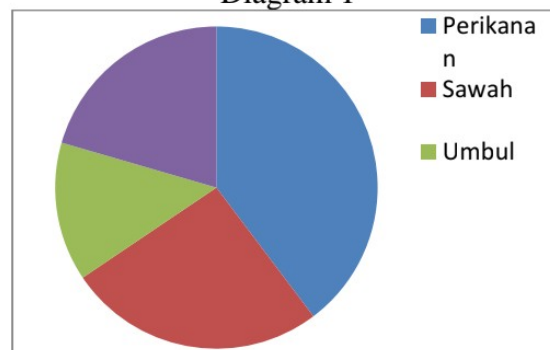
Secara Administrasi, Kecamatan Kalikotes dibagi menjadi 7 Desa, 106 Dukuh, 94 RW dan 290 RT. Adapun ke 7 desa itu adalah Jimbung dengan 33 dukuh, 29 RW dan 107 RT, Ngemplak dengan 9 dukuh, 13 RW dan 30 RT, Kalikotes dengan 14 dukuh, 9 RW dan 31 RT, Krajan dengan 10 dukuh, 10 RW dan 26 RT, Tambong Wetan dengan 11 dukuh, 8 RW dan 26

¹ Statistik Daerah Kecamatan Kalikotes 2019 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten) dikutip dari <http://klatenkab.bps.go.id/> diakses 28-10-2020.

RT, Gemblegan dengan 13 dukuh, 13 RW dan 35 RT dan Jogosetran dengan 16 dukuh, 12 RW dan 35 RT.

Luas areal perikanan di Kecamatan Kalikotes tahun 2018 seluas 12,192 hektar tidak mengalami perubahan. Areal perikanan terbesar terdapat di kolam seluas 4,843 hektar (39,72%), sawah seluas 3,149 hektar (25,83%), umbul seluas 1,700 hektar (13,94%) dan sungai seluas 2,500 hektar (20,50%).²

Luas Area Budidaya Air Tawar
Tahun 2017-2018
Diagram 1



2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Penduduk dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DKB = Data Konsolidasi Bersih), penduduk Kecamatan Kalikotes sebanyak 37.943 jiwa, terdiri dari penduduk laki – laki 18.996 jiwa dan 18.947 jiwa penduduk perempuan. Naik sebesar 66 jiwa (0,02 persen) terhadap tahun 2017. Kepadatan penduduk Kecamatan Kalikotes sebesar 2.916 jiwa per Km² . Desa terpadat adalah Desa Jogosetran sebesar 4.541 jiwa per Km² disusul Desa Kalikotes sebesar 3.090 jiwa per Km². Sedangkan desa terendah kepadatan nya adalah Desa Ngemplak yaitu sebesar 1.955 jiwa per Km².³

² Ibid.

³ Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dikutip dari <http://klatenkab.bps.go.id/> diakses 28-10-2020.

Penduduk Kecamatan Kalikotes Menurut Data Dinas
Kependudukan Catatan Sipil 2018

Tabel.1

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Jiwa	18,996	18,947	37,943

3. Fasilitas Umum

Terdapat beberapa fasilitas umum yang ada di Kecamatan Kalikotes, yaitu:

a. Sarana Sekolah

Jumlah TK selama tahun 2018 sebanyak 20 sekolah. Jumlah murid 879 orang mengalami kenaikan sebesar 0,69 persen, tetapi jumlah guru sebanyak 50 orang, mengalami penurunan sebesar 0,02 persen disbanding tahun 2017. Jumlah SD sebanyak 24 sekolah. Sama dengan tahun 2017. Terdiri dari 21 SD Negeri (87,50 persen) dan 3 Madrasah Ibtidaiyah (12,50 persen). Jumlah murid SD/MI selama tahun 2018 sebanyak 2.975 siswa, turun sebesar 0,03 persen bila dibandingkan terhadap tahun 2017. Jika dilihat pengelola sekolah, terdiri dari 2.303 murid sekolah negeri (77,41 persen) dan 672 murid sekolah swasta (22,59 persen). Jumlah guru sebanyak 203 orang turun sebesar 0,17 persen. Jumlah SMP selama tahun 2018 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 1 sekolah. Jumlah murid sebesar 841 orang mengalami penurunan sebesar 0,01 persen bila dibandingkan terhadap tahun 2017 dan jumlah guru sebanyak 50 orang mengalami penurunan sebesar 0,07 persen dibanding tahun 2017.⁴

Jumlah Sekolah Kecamatan Kalikotes 2017-2018

Tabel.2

Jenjang	Jumlah Sekolah	
	2017	2018
TK	20	20
SD	21	21
MI	3	3
SLTP	1	1

⁴ Ibid.

b. Sarana Kesehatan

Pada Tahun 2018, Kecamatan Kalikotes memiliki 3 orang dokter umum, 2 orang dokter umum terdapat di desa Gemblegan dan 1 orang dokter umum berada di desa Jogosetran. Dan hanya memiliki 1 orang dokter gigi yang terdapat di desa Gemblegan. Berbeda dengan jumlah dokter, jumlah perawat di Kecamatan Kalikotes sebanyak 20 orang yang tersebar di desa Jimbung sebanyak 2 orang, desa Kalikotes sebanyak 1 orang, desa Krajan Sebanyak 4 orang, desa Tambong Wetan sebanyak 2 orang, desa Gemblegan sebanyak 10 orang dan di desa Jogosetran 1 orang. Jumlah bidan sebanyak 9 orang yang tersebar di 4 desa, yaitu desa Jimbung 2 orang, desa Ngemplak 1 orang, desa Kalikotes 2 orang dan Gemblegan 4 orang.⁵

Jumlah Tenaga Medis Kecamatan Kalikotes
Tahun 2017-2018
Tabel.3

Tenaga Medis	2017	2018
Dokter Umum	1	1
Dokter Gigi	1	1
Perawat	20	20
Bidan	9	9

Sumber dari : Kecamatan Kalikotes Dalam Rangka 2019 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten) Dikutip dari <http://klatenkab.bps.go.id/>

⁵ Kecamatan Kalikotes Dalam Rangka 2019 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten) Dikutip dari <http://klatenkab.bps.go.id/> diakses 28-10-2020.

Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kalikotes
Tahun 2017-2018

Tabel.4

Sarana Kesehatan	2017	2018
Puskesmas	1	1
Puskesmas Pembantu	2	2
PKD (Rumah Bersalin)	6	6

Sumber dari: Kecamatan Kalikotes Dalam Rangka 2019 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten) Dikutip dari <http://klatenkab.bps.go.id/>

Keadaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten tergolong sejahtera, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengusaha *home industry* baik industri pembuatan tahu, industri furniture maupun industri kerajinan lainnya dengan sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa masyarakat yang pra sejahtera karena tempat tinggal yang pelosok dan jauh dari pemukiman yang dianggap masih belum mampu dalam hal baik finansial maupun tempat tinggal.

Sebagian mata pencahariaan masyarakat di Kecamatan Kalikotes adalah petani, dapat dilihat dari banyaknya area sawah yang ada di wilayah Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten sebagian masyarakat memeluk agama Islam, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masjid-masjid, sekolah pondok, sekolah diniyah (MI) di wilayah Kecamatan Kalikotes. Kerukunan masyarakat dalam beragama sangat kuat dan dianggap baik, karena terjalinnya silaturahmi diantara mereka dalam beragama, toleransi

antar beragama yang baik. Kuatnya pemuka agama dalam keyakinan yang dianutnya baik agama Islam maupun Non Islam yang mencerminkan keteguhan iman agama yang dianutnya. Masyarakat di wilayah Kecamatan Kalikotes masih banyak mengadakan pengajian rutin baik mingguan di malam tertentu maupun hari libur, untuk non Islam juga masih ke gereja untuk ibadah dan perayaan hari tertentu untuk agama kepercayaan lainnya.

Dari uraian diatas terlihat bahwasannya kesadaran dalam beragama masyarakat Kalikotes sangat bagus. Meskipun ada sebagian masyarakat yang masih memercayai dukun, santet dan sebagainya. Semua itu tergantung kepercayaan yang dianut, yang terpenting masyarakat masih memercayai/ selalu ingat terhadap Allah SWT untuk senantiasa tetap menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangannya.

Menjamurnya usaha pom mini/ pertamini di Kecamatan Kalikotes Klaten menjadikan sebagian besar masyarakat ingin memiliki mesin tersebut untuk usaha bisnis pertamini. Fonemona tersebut dapat kita jumpai di wilayah Kabupaten Klaten yang dulunya menjual bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan botol kemudian sudah banyak beralih dengan menggunakan mesin pertamini/ alat yang menyerupai SPBU (Pertamina) tersebut. Namun, penulis akan lebih menfokuskan penelitian di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.

Peneliti mengambil 3 (tiga) sample penjual dari beberapa penjual bahan bakar minyak yang menggunakan mesin Pertamina yang ada di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.

B. Gambaran Umum

1. Profil Pertamina

Pertamini adalah bentuk usaha dagang bahan bakar minyak dalam bentuk mesin yang menggunakan tenaga listrik untuk menggerakannya untuk menyalurkan bahan bakar tersebut keluar ke tempat bahan bakar sepeda motor atau mobil dengan menggunakan selang sebagai penyalurnya. Nama Pertamina merupakan campuran dari kata Pertamina dan mini, Pertamina sebagai label stasiun bahan bakar mini atau pom mini. Sebutan Pertamina sebagai inovasi baru penjualan bahan bakar minyak yang tidak menggunakan botol lagi.⁶

Pertamini khususnya di Wilayah Kecamatan Kalikotes, Klaten sangat membantu masyarakat yang kehabisan BBM karena jarak SPBU yang jauh. Selain itu hadirnya mesin Pertamina merupakan inovasi baru dari bentuk penjualan bensin eceran yang awalnya menggunakan botol kemudian berubah dengan menggunakan mesin Pertamina.

Penjual bahan bakar minyak yang menggunakan mesin Pertamina ada beberapa macam jenis mesin Pertamina digital yaitu, ada yang satu mesin ada 2 macam bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax, untuk yang penjual lainnya menggunakan mesin Pertamina dengan satu macam bahan bakar minyak baik Pertalite maupun Pertamax saja.

⁶ Erlin Fatmawati, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Di Wonocolo*, Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019, hlm 44.

Istilah pertamini sekilas mirip dengan Pertamina (SPBU), namun pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan lembaga penyalur resmi Pertamina. Beberapa lembaga resmi Pertamina yaitu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), dan agen premium dan minyak solar (APMS).⁷

Mesin pertamini merupakan inovasi baru yang uji keamanan, standar mesinnya belum terjamin, ada beberapa kejadian kebakaran mesin pertamini di daerah pemukiman yang banyak penduduk. Belum lama di Kota Gresik Pada 7 Januari 2020 Pukul 07.30 WIB terjadi Kebakaran Pertamina yang diakibatkan karena mesin korslet kemudian mesin terbakar.

Menurut Polsek Kebomas Iptu Hary Agung mengatakan dari hasil keterangan warga di lokasi, kebakaran dipicu oleh mesin otomatis Pertamina yang korslet. Setelah itu, menyambar BBM yang diisi oleh korban. “Kami amankan mesinnya, terlihat gosong. Namun, penyebab pastinya kami lakukan pemeriksaan ulang”⁸

Menurut bapak Widodo penjual BBM yang menggunakan mesin pertamini tidak perlu menggunakan ijin untuk pendiriannya, hanya saja menyiapkan tempat yang akan ditaruh mesin pom mini tersebut.⁹

⁷ Ibid.,

⁸ Wijayanto, ”Mesin Korslet, Pertamina di Perum Mandiri Kebomas Terbakar”
Dikutip dari <http://radarsurabaya.jawapos.com> diakses Minggu 4 Oktober 2020.

⁹ Widodo, Pemasar Mesin Pertamina, Wawancara Pribadi, 21 April 2020.

2. Macam- Macam Pertamina

Alat Pertamina semakin menjamur, sebab cara pakai yang lebih fleksibel dibandingkan penjualan bensin yang menggunakan botol eceran. Penggunaan mesin Pertamina/ pom mini sangatlah simple, cukup dengan masukan kode tembakan dengan nominal tertentu (jika Pertamina digital) atau kayuh tangki mesin Pertamina (jika Pertamina manual) kemudian pasang selang nozzle yang akan keluar bahan bakar ke lubang pengisian BBM pada kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun alat Pertamina sendiri memiliki beberapa macam, diantaranya sebagai berikut :

a. Pertamina Manual

Pertamina manual merupakan sebuah alat untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM yang penggunaannya praktis dengan memakai pompa menggunakan tangan pada penampungan gelas ukur transparan.¹⁰

Alat Pertamina manual standar terbuat dari bahan plat besi dengan bagian atasnya terbuat dari bahan stainless. Alat ini masih dilengkapi dengan pompa manual yang berfungsi memompa BBM dari tangki yang ada di bawah untuk dipindahkan pada tabung yang berada di atas. Alat

¹⁰ Suci Aini Fatana, *Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya*, tidak diterbitkan, Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018., hlm 43

ini juga tidak memerlukan listrik karena bbm yang telah dipompa pada tabung atas tinggal dialirkan dengan menggunakan selang nozzle.¹¹

b. Pertamina Digital

Pertamina digital merupakan sebuah alat penyaluran bahan bakar minyak dengan inovasi baru setelah adanya Pertamina manual. Tentunya dengan cara penggunaan yang lebih praktis, hemat tenaga karena sudah menggunakan listrik. Desain mesin Pertamina digital sangat praktis dengan tampungan penyimpanan bahan bakar minyak yang tertutup menjadi satu box dengan mesin tersebut.

Daya tampung pada mesin Pertamina digital antara 150 liter – 210 liter. Alat ini dilengkapi dengan tombol panel pada layar, harga bbm serta jumlah bbm yang keluar berapa liter. Mesin yang bisa dicek jumlah liter yang sudah laku tetapi menggunakan alat ini sekaligus bisa melakukan pengecekan berapa total pendapatannya. Sehingga, untuk menggunakan alat ini juga lebih mudah.

Harga jual bbm pada kios Pertamina cenderung lebih mahal dari harga jual di SPBU Pertamina. Salah satu faktornya adalah pedagang BBM dengan kios Pertamina memasok bbm dari SPBU. Harga jual yang ditetapkan merupakan jumlah dari harga beli ditambah dengan keuntungan dan juga biaya operasional. Tentunya pedagang BBM dengan menggunakan kios Pertamina ini mengambil keuntungan yang berbeda-beda. Pengambilan keuntungan disebabkan beberapa faktor,

¹¹ Erlin Fatmawati, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Di Wonocolo*, Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019., hlm.43

yaitu sebab biaya operasional yang dikeluarkan setiap pemilik kios Pertamina juga berbeda. Perbedaan jenis alat Pertamina juga dapat mempengaruhi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pemilik.

3. Mekanisme Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten

Jual beli bbm menggunakan mesin pertamini di Kecamatan Kalikotes dilatarbelakangi masyarakat yang sebagian besar merupakan wiraswasta atau usaha. Adanya jual beli bbm menggunakan mesin pertamini berawal dari penjual yang berjualan bbm menggunakan botol dengan beralih menggunakan pertamini manual yang sudah ada garis literannya yang dikayuh dengan tenaga kemudian beralih menggunakan mesin pertamini digital.

Masyarakat di Kecamatan Kalikotes yang memilih untuk membuka usaha berjualan bbm menggunakan mesin pertamini dikarenakan praktis, mudah cara pemakaiannya dan hemat waktu.¹²

4. Objek Transaksi

Dalam transaksi jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten objek yang digunakan dalam transaksi adalah bahan bakar minyak/ bbm. Jenis yang lebih sering digunakan adalah pertalite dan pertamax.

¹² Puji Hartatik, *Wawancara*, Klaten, 20 April 2020.

5. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan transaksi jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital Di Kecamatan Kalikotes dilakukan di dekat mesin tersebut agar ketika penyaluran bbm dari selang *noozle* ke motor pembeli mudah.

6. Cara Menyimpan

Objek yang digunakan adalah bahan bakar minyak/ bbm. Penyimpanan bahan bakar minyak/ bbm didalam mesin pertamini digital dengan penampungan ± 1000 liter yang terbuat dari plat besi berbentuk persegi yang terletak persis dibelakang mesin pertamini digital dengan lubang diatasnya dengan tutup sebagai penyalur untuk mengisi bbm tersebut jika habis.

7. Cara Mendapatkan Konsumen

Untuk mendapatkan konsumen, tentu saja penjual harus bersikap ramah, sopan baik saat menawarkan bbm atau sedang transaksi. Biasanya penjual menunggu motor yang berhenti persis di depan mesin pertamini yang kemudian ditanyakan apakah akan memberi bbm atau tidak. Saat itu konsumen/ pembeli membuka jok dan menjawab akan membeli bbm yang menandakan adanya transaksi tersebut.¹³ Pembeli mengetahui tempat tersebut menjual bbm karena terdapat bendera yang bertuliskan tempat pengisian bbm tepat diatas mesin tersebut atau bahkan didekat mesin tersebut berada.

¹³ Puji Hartatik, (Penjual BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital), Wawancara, Kalikotes, 20 April 2020.

8. Cara Ijab Qabul

Dalam transaksi jual beli tersebut, ijab dan qabul antara penjual dan pembeli menggunakan kat-kata sebagai berikut:¹⁴

(Ketika ada pembeli yang berhenti didepan mesin pertamini digital)

“Bensin, mbak?”

“iya mbak beli bensin 1 liter.”

“nggeh mbak.”

“mulai dari 0 nggeh.” (sambil mengarahkan selang noozle Ke tangki motor pembeli)

Ketika berbunyi tit, pengisian bbm dimulai yang kemudiang dibarengi dengan angka pada papan digital pada mesin pertamini hingga berbunyi tit yang menandakan pengisian selesai. Setelah itu pembeli menyerahkan uang sejumlah harga yang sudah disepakati.

“niki mbak artone”

“iya mbak pas (menyerahkan uang Rp.8,500,00)”

“terimakasih nggih mbak”

9. Cara Menimbang/ Menakar

Cara menimbang atau menakar dalam bbm di mesin pertamini sudah diatur dalam mesin itu sendiri dengan diprogram pada nominal dan literannya, tinggal memencet tombol sesuai nominal atau per liternya untuk mendapatkan bbm dari mesin tersebut. Untuk menjaga

¹⁴ Amri dan Puji Hartatik, *Wawancara*, Klaten, 20 April 2020.

agar takaran tetap sama, ada beberapa penjual yang melakukan pengecekan takaran pada jangka waktu tertentu.

10. Cara Penetapan Harga

Dalam penetapan harga bbm di Pertamina Digital penjual mengambil keuntungan Rp.1,000/liternya, hal ini digunakan sebagai biaya pengganti operasional dan lain-lain. Untuk pembelian bbm di SPBU harga jenis pertalite Rp.7,650,00/liter dijual di kios pertamini digital Rp.8500-Rp.8,600 dan jenis pertamax Rp.9,000/liter dijual di kios pertamini digital Rp.10,000/liter.¹⁵

11. Cara Menyerahkan Barang

Penyerahan barang pada bbm yang terdapat di mesin pertamini digital dengan cara menyalurkan, menyalurkan dari mesin pertamini digital ke tangki motor pembeli melalui selang *noozle* dengan memencet tombol panel sesuai nominal atau literan pada mesin pertamini digital yang sudah di program saat pembuatan mesin tersebut.

12. Tanggapan Masyarakat

Tanggapan masyarakat mengenai jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital lumrah dalam kegiatannya. Sebab masyarakat merasa terbantu adanya kios-kios pertamini digital yang terdapat dipinggir jalan baik jalan desa ke kota maupun arah sebaliknya. Masyarakat menyadari keadaan SPBU yang lumayan jauh, dengan keadaan munculnya pertamini digital dapat membantu masyarakat yang

¹⁵ Marni, Penjual Bbm Pertamina, *Wawancara*, Klaten, 10 April 2020.

kehabisan bbm di jalan hendak menuju ke SPBU jauh, terburu-buru untuk pergi dan membantu masyarakat yang rumahnya dekat dengan menggunakan motor disekitar rumah saja enggan membeli bbm di SPBU.¹⁶

¹⁶ Anita dan Amri, Pembeli Bbm Pertamina, *Wawancara*, Klaten, 20 Mei 2020.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BBM MENGGUNAKAN MESIN PERTAMINI DIGITAL

A. Analisis Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten

1. Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital di Kecamatan Kalikotes Klaten

Peneliti mengambil 5 (lima) sample penjual dari beberapa penjual bahan bakar minyak yang menggunakan mesin Pertamina yang ada di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten, 3 (tiga) Pembeli dan 1 (satu) Pegawai SPBU.

Pertama, peneliti menemui Ibu Tatik yang memiliki kios di perbatasan Prigi Wetan, Gemblegan, Kalikotes, Klaten dengan Prigi Wetan, Jogosetran, Kalikotes, Klaten. Kepada peneliti Ibu Tatik menceritakan awal mula berjualan bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan botol sudah sekitar 2 tahun lalu, kemudian ditawarkan seorang laki-laki yang bernama Bapak Widodo untuk bekerja sama bagi hasil 60:40 dengan berjualan bahan bakar minyak menggunakan mesin Pertamina satu selang *noozle* dengan jenis Pertamina yang dimiliki Bapak Widodo, presentase 60% untuk pemilik mesin Pertamina digital yaitu Bapak Widodo dan Ibu Tatik 40% sebagai penjual bahan bakar minyak ditempat yang sudah disediakan untuk biaya listrik ditanggung bersama.¹

¹ Puji Hartatik, Penjual BBM Pertamina, *Wawancara*, Klaten, 20 April 2020.

Alasan Ibu Tatik menerima penawaran dari Pak Widodo karena tidak ada biaya sepeserpun, hanya menyiapkan tempat untuk mesin pertamini dan menyediakan listrik dengan daya 125 watt. Lokasi mesin Pertamina milik Ibu Tatik persis di depan kios Toko Mini Marketnya, jalan yang strategi adalah peluang emas Ibu Tatik untuk membuka pom mini didepan tokonya. Jarak Pertamina milik Bu Tatik dengan Pertamina SPBU sekitar 1 km.

Harga jual untuk bahan bakar minyak pertamini yang ada di kios Ibu Tatik 1 Liter Rp.8,600,00 untuk jenis pertalite saja. Namun pada mesin yang ada di Kios Ibu Tatik tetap melayani berapa pun konsumen akan membeli. Apabila ada kerusakan takaran atau eror pada mesin pertamini Ibu Tatik hanya tinggal menelfon Bapak Widodo untuk memperbaikinya. Adapun pengecekan takaran dilakukan seminggu sekali.²

Kedua, peneliti menemui Ibu Marni untuk di wawancarai. Ibu Marni memiliki mesin pertamini digital sudah sejak 1 tahun lebih, dengan modal harga 15 juta untuk mendapatkan mesin pertamini dengan dua noozle jenis bbm pertalite dan pertamax.

Menurut beliau Ibu Marni Penjual bbm menggunakan mesin pertamini berkata ketika ditanyakan mengenai ijin pembukaan dengan menggunakan mesin pertamini tidak memerlukan syarat apapun baik datang untuk lapor ke kelurahan maupun Pemerintah Daerah.

² Ibid.,

Jawabannya ketika saya menanyakan ijin membuka usaha pertamini tersebut. Pasokan bahan bakar minyak Ibu Marni di pertamininya, Ibu Marni membeli bahan bakar minyak ke SPBU Ketandan dengan membawa 2 jerigen besar berisi 30 liter masing-masing jerigen setiap harinya. Harga jual di kios Ibu Marni untuk pertalite Rp. 8.500,00/ liter dan pertamax Rp.10.000,00/ liter. Masalah pengecekan pada kios pertamini milik Ibu Marni beliau jarang melakukan pengecekan karena dianggap sudah sesuai takaran dan benar.

Lokasi kios pertamini Ibu Marni di sebelah selatan Jalan Tambongwetan ke arah Trucuk, Ibu Marni membuka kios pertamini persis didepan kiosnya yang merupakan tempat pembungkusan usaha online yang menjual berbagai macam seprai untuk kasur, bantal dan guling. Kios pertamini Ibu Marni buka dari pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB.

Jarak lokasi pertamini tempat Ibu Marni dengan SPBU lumayan jauh, kurang lebih 4 km. Untuk keamanan, Ibu Marni sudah memiliki alat pemadam api/ Hydrant. Lokasi Ibu Marni dengan pemukiman lumayan agak jauh, karena pojok desa Tambongwetan.³

Ketiga, peneliti mewawancarai pegawai SPBU Ketandan yang bernama Iwan, Mengenai pembelian pertalite dan pertamax tidak dibatasi, namun untuk solar dibatasi. Pembebasan pembelian bahan bakar minyak pertalite dan pertamax membuat masyarakat dengan leluasa dapat membeli

³ Marni, Penjual BBM Pertamina, *Wawancara*, Klaten, 28 Maret 2020.

dengan jumlah banyak. Ketika akan membeli bahan bakar minyak Mas Iwan mengungkapkan

“Iwan Pegawai SPBU Ketandan mengungkapkan bahwa ketika pembeli bbm menggunakan jerigen mereka tidak menggunakan jerigen yang disarankan oleh SPBU dengan penggunaan jerigen besi namun tetap memakai jerigen plastik”.

Jawaban yang didapati saat mewawancarai Mas Iwan Pegawai SPBU Ketandan. Harga pertalite Rp.7.650,00/ liter dan pertamax Rp. 9.000,00/ liter, baik pembeli dalam jumlah banyak maupun sedikit tetap sama.⁴

Keempat, peneliti mewawancarai pembeli yang pernah membeli di SPBU/ pertamina dan pertamini/ pom mini bernama Anita, ketika ditanya mengenai membeli di pertamina dengan pom mini berbeda takaran atau sama saja? Anita menjawab bahwa ketika dia membeli di SPBU/ pertamina merasa puas, tetapi ketika membeli di pom mini dia merasa kurang puas karena terkadang cepat habis ketika membeli di pom mini dibandingkan di SPBU/ pertamina. Tetapi, menurutnya adanya pom mini dapat membantu saat kehabisan bahan bakar minyak, tidak perlu ke SPBU karena jauh. Mengenai harga pertamini dengan SPBU jelas berbeda, tapi kadang penjual pertamini masih mengurangi takaran padahal sudah ambil untung entah disengaja maupun kesalahan dari mesin itu sendiri.⁵

Kelima, peneliti mewawancarai Bapak Widodo sebagai pembeli dan penjual BBM yang bekerja sama dengan Ibu Tatik untuk bagi hasilnya. Beliau berperan sebagai penjual mesin pertamini sekaligus dari temannya

⁴ Iwan, Pegawai SPBU, *Wawancara*, Klaten, 20 April 2020

⁵ Anita Rahmawati, Konsumen, *Wawancara*, Klaten, 10 April 2020

yang merupakan rekan bisnisnya, selain sebagai penjual mesin pertamini, tukang service mesin tersebut Pak Widodo juga melakukan kerjasama bagi hasil kepada beberapa orang yang salah satunya Ibu Tatik tersebut.

Kata beliau ketika menjual mesin pertamini jenis satu noozle beliau menjual kisaran Rp. 7,000,000,00/ mesin dan dua noozle kisaran Rp. 11,000,000,00/ mesin. Penurunan penjual mesin sudah biasa karena tidak sedikit masyarakat yang sudah memiliki mesin pertamini tersebut.

Pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak menggunakan mesin pom mini/ pertamini kini semakin banyak, baik karena praktis, mudahnya membeli bahan bakar minyak dengan jumlah yang banyak membuat masyarakat tidak sedikit yang ingin memiliki usaha seperti memiliki pom mini sendiri. Dalam hal ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai pelaksanaan jual beli bbm yang menggunakan mesin pom mini/ pertamini antara kedua belah pihak yaitu, penjual bbm, pembeli, objek atau barang dan ijab qabul.

Beberapa penjual bbm menggunakan mesin pertamini digital di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten dengan cara mengambil sampel 1 liter bbm jenis pertalite selain di Kios Ibu Tatik (Prigi Wetan) dan Ibu Marni (Tambongwetan, Kec Kalikotes). Peneliti mengambil sampel di kios pertamini digital milik Bapak Heriyanto (Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes), Ibu Sri Lestari (Gentongan, Kalikotes) dan Ibu Ningsih (Tambong kulon, Kalikotes). Kemudian peneliti melakukan penakaran apakah sudah pas dan benar takaran pada beberapa kios pertamini tersebut.

a. Proses Jual Beli BBM Pom mini

Proses kegiatan jual beli ini dilakukan antara penjual BBM (pedagang) dengan pembeli BBM (konsumen). Seorang pembeli hendak membeli bbm karena bbm di motor miliknya sudah hampir habis, kemudian pembeli melihat dan menemukan pom mini/ pertamini terdekat kemudian pembeli berfikir ketika dia hendak ke SPBU akan lebih jauh, maka pembeli kemudian memutuskan untuk berhenti membeli di pom mini/ pertamini terdekat. Dengan ungkapan “mbak bensin, satu liter” pembeli berkata, dan secara langsung penjual langsung menjawab “nggeh” kemudian mengambil selang noozle dan menekan tombol yang sudah disetting untuk pembelian tertentu, kemudian selang noozle diarahkan ke tempat pengisian bbm pada motor pembeli ketika mesin sudah berbunyi “tit” artinya pengisian sudah mencapai nominal yang dipencet tadi yaitu sejumlah 1 liter atau sama dengan Rp.8,600,00. Kemudian pembeli menyerahkan uang dan langsung menutup jok motor kemudian hendak melanjutkan perjalanan. Maka transaksi jual beli tersebut telah selesai.

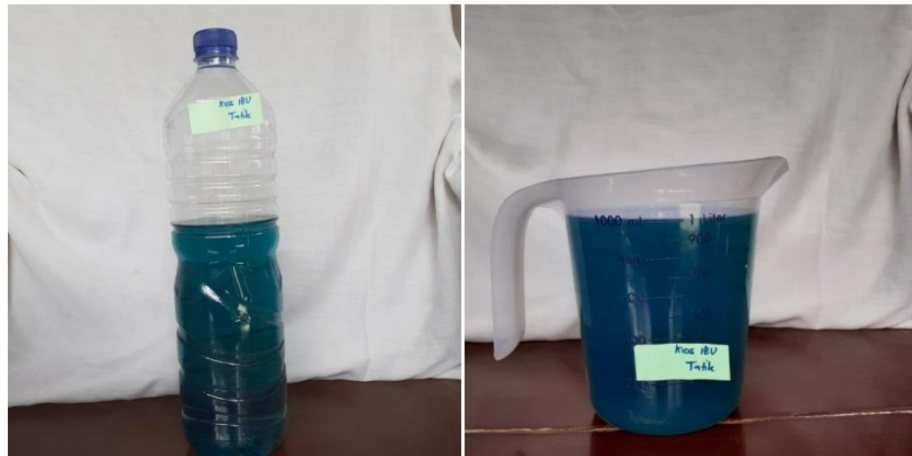
b. Objek Jual Beli BBM Pom mini

Barang yang menjadi objek jual beli bbm pom mini adalah bahan bakar jenis pertalite dan pertamax. Beberapa faktor penyebab ketidaksesuaian takaran pada pom mini/ pertamini disini adalah pertama, karena tidak standartnya mesin pom mini/ pertamini dengan Badan Metrologi Legal. Kedua, banyaknya persaingan usaha dalam jual beli

bbm menggunakan mesin pom mini/ pertamini yang sama-sama menjual bbm. Khususnya pertalite dan pertamax.

Faktor salah satu diatas, menyebabkan perbedaan takaran antara pom mini satu dengan pom mini yang lain. Harga dalam SPBU untuk jenis pertalite Rp.7.650,00/ liter kemudian dijual di pom mini Rp.8500 – Rp.8.600,00/ liter, untuk harga jenis pertamax di SPBU Rp.9.000,00/ liter dengan pom mini Rp.10.000,00/ liter. Penjual mendapatkan keuntungan Rp.1.000,00 untuk setiap liternya baik jenis pertalite maupun pertamax.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melakukan eksperimen dengan membandingkan hasil pembelian 1 liter di SPBU dengan di pom mini disertai sampel dengan menggunakan botol eceran. Berikut adalah hasil penelitiannya:



Gambar 1
(Pada gambar ini merupakan hasil pembelian 1 liter jenis pertalite di kios Ibu Tatik (Prigi Wetan)



Gambar 2
(Pada gambar ini merupakan hasil pembelian 1liter jenis pertalite di kios
pertamini Ibu Marni (Tambong Wetan)



Gambar 3
(Hasil Pembelian 1 Liter Jenis PetaLite di kios Pertamina Ibu Ningsih
(Tambong Kulon)



Gambar 4
Hasil Pembelian 1 Liter Kios pertamini Bapak Heriyanto
(Kalikotes)



Gambar 5
Hasil Pembelian 1 Liter Kios Pertamina Digital Ibu Sri Lestari
(Gentongan)



Gambar 6
Hasil Pembelian 1 Liter di 5 Kios Pertamina Digital di Kecamatan
Kalikotes
(Ibu Tatik, Ibu Ningsih, Ibu Marni, Ibu Sri Lestari dan Bapak Heriyanto)

c. Ijab Qabul Jual Beli BBM Pom mini/ Pertamina

Ijab qabul yang digunakan pada pembelian bbm disini menggunakan ucapan dan isyarat. Dengan menggunakan ucapan misalnya pembeli mengucapkan:

“Transaksi antara penjual Kios Pertamina Ibu Tatik dan pembeli untuk membeli bbm menggunakan mesin pertamini ketika pembeli berhenti didepan mesin pertamini dan ingin membeli bensin dengan sejumlah uang yang sudah disepakati kemudian penjual mengambil selang noozle dengan memencet sejumlah nominal kemudian pembeli membayar sejumlah uang yang sudah disepakati diawal.”

Setelah bensin terisi kemudian mesin pom mini berbunyi “tit” menandakan pengisian sudah selesai dan pembeli menyerahkan uang Rp.8,500,00 atau sejumlah harga 1 liter kepada penjual yang selanjutnya penjual menerima uang tersebut karena sudah melakukan transaksi tersebut.

Pada kegiatan jual beli diatas, pembayaran diberikan secara tunai atau langsung dan tidak ada proses tawar menawar sebelumnya. Setelah akad jual beli bahan bakar minyak menggunakan mesin pertamini digital antara penjual dan pembeli, dengan penjual menyerahkan objek berupa bensin/ bbm jenis pertalite maupun pertamax. Kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual dengan harga yang sudah pembeli sepakati.

Setelah dilakukan wawancara dengan berbagai pihak baik penjual BBM yang menggunakan mesin pertamini digital, pembeli, dan pengelola SPBU yang ada di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten, maka permasalahannya adalah munculnya ketidaksesuaian takaran dikios pertamini digital yang membuat pembeli terkadang tidak puas, kecewa ketika membeli bahan bakar minyak baik jenis pertalite maupun pertamax di kios pertamini dan tidak enak hati ketika akan menyampaikan kepada penjual.

Namun, dari adanya fenomena tadi masyarakat masih saja terkadang tetap membeli bahan bakar minyak di kios pertamini karena ketika pembeli ingin membeli bensin di SPBU yang lumayan jauh, tidak ada pilihan lain harus mencari kios pertamini digital yang dekat dengan lokasinya. Walaupun harga tidak sama bahkan jauh lebih mahal dari SPBU, namun bagaimana jika perliter dari bbm tersebut takarannya tidak pas sesuai satu liter pada mesin pertamini digital. Ketidaksesuaian takaran yang ada di mesin pertamini merupakan suatu hal yang tidak

terlihat jelas. Perbedaan takaran bukan dari kesalahan penjual bahan bakar minyak tetapi merupakan sudah takaran dari mesin pertamini yang menggunakan selang noozle tersebut. Meskipun demikian, adanya kios pertamini tersebut dapat membantu masyarakat ketika terburu-buru pergi tidak ingin antri ke SPBU dan membantu ketika bensin sudah hampir habis sehingga dapat membeli bensin ke kios pertamini terdekat.

B. Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital Ditinjau dengan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina

Dalam Islam, manusia dalam berperilaku diatur menurut Hukum Islam, termasuk dalam kegiatan jual beli. Adanya aturan-aturan etika islam dalam islam bertujuan agar manusia tidak mudah melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kegiatan jual beli dan usaha masyarakat terkadang sangat mengharapkan keuntungan yang banyak sehingga melupakan batasan halal dan haram yang sudah diatur dalam islam. Batasan yang dimaksud seperti contohnya penjual BBM pertamini yang mengurangi takaran dalam literan. Baik dalam bentuk barang yang ditimbang atau barang yang ditakar demi mendapatkan keuntungan yang banyak.

Kegiatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam islam, seperti menghalalkan riba, perjudian, mengurangi takaran atau timbangan dan menjual barang yang haram.

Dalam QS: Al-Isra' (17) : 35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁶

Yang Artinya

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra: 35)

Ayat diatas menegaskan bahwasanya alat timbangan sangat penting dalam dunia usaha untuk keberlangsungan bagi pembeli maupun penjual, proses takaran yang sempurna menjadikan keberkahan yang jauh lebih baik. Dalam bisnis yang mengalami perkembangan tetap membutuhkan takaran dan timbangan, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan adanya penegasan dalam hal timbangan sebab kebanyakan manusia menyepelekan urusan timbangan dan takaran.

Praktik jual beli BBM menggunakan mesin pertamini di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten dalam kegiatan jual beli sudah sah baik dilihat dari akad, objek jual beli dan serah terima barangnya akan tetapi disini masih terdapat gharar (ketidakpastian) dalam hal takaran, baik penjual maupun pembeli tidak melihat secara langsung, karena penjual yang memakai mesin pertamini/ pom mini tidak mengetahui takaran yang benar secara pasti karena mesin yang digunakan tinggal memakai saja, namun dalam hal ini tidak dapat dihindari sebab merupakan gharar/ ketidakpastian yang diperbolehkan dalam islam dan tidak dapat dipisahkan antara mesin tersebut. Asalkan

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surakarta: Az-Ziyadah, hlm.285

dalam takaran tersebut tidak kurang satu liter dengan terlalu banyak yang disebabkan kesengajaan, apabila kekurangan tersebut karena kesalahan dari mesin tersebut maka diperbolehkan.

Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada beberapa macam. Yaitu: yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (ma'dum).

Disepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya.

Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya.

Menurut ijma', diperbolehkan. Para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah.”

Ibnul Qayyim juga mengatakan “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Sebab, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.

Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya. Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan.

Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya

ringan. Di lihat dari sisi lain, adanya pom mini terdekat dapat membantu masyarakat yang terburu-buru, kehabisan bensin dan tidak mau datang jauh-jauh ke SPBU yang jaraknya lumayan.

Dengan adanya pertukaran hak kepemilikan baik dari pembeli untuk mendapatkan BBM berupa Pertalite maupun Pertamina dengan mengganti sejumlah uang kepada penjual, maka timbul suatu hukum yang mana pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dalam hal jual beli ini yaitu BBM dan penjual mendapatkan apa yang dia inginkan dengan pengantian sejumlah uang dengan hasil menjual BBM sebagai alat pembayaran merupakan suatu bentuk pertukaran kepemilikan.

Namun mengenai hal takaran dalam BBM yang terdapat pada mesin Pertamina tidak terlihat secara jelas dapat dikatakan gharar, akan tetapi gharar dalam transaksi jual beli BBM ini dikategorikan dalam gharar ringan atau gharar yang diperbolehkan dalam Islam. Sebab kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena mesin Pertamina merupakan sebuah bentuk inovasi baru dalam penyaluran BBM,

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan : “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya ; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”. Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.⁷

⁷ Jual Beli Gharar Yang Diperbolehkan, Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html/> diakses 04-11-2020.

Jadi kegiatan jual beli yang mengandung gharar diperbolehkan asalkan gharar yang diperbolehkan pada tingkatan ringan dan tidak dapat dihindari.

Hukum asal bermuamalah adalah boleh kecuali ada nash yang melarang untuk mengharamkan, sebagaimana dalam praktik jual beli BBM menggunakan mesin Pertamina di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten belum ada nash/ dalil yang melarang maka diperbolehkan dan asal tidak bertentangan dengan dalil yang melarang.

b. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital

Kegiatan jual beli bahan bakar minyak yang menggunakan botol eceran kini seiring dengan perkembangan jaman beralih dengan menggunakan mesin yang bernama pom mini/ Pertamina. Cara kerja mesin ini dirasa lebih simple dan praktis ketika penjual mengisi BBM ke motor pembeli hanya tinggal mengambil selang nozzle dengan memencet nominal BBM yang akan dibeli konsumen kemudian selang nozzle tersebut diarahkan ke motor pembeli apabila sudah selesai pembeli membayar sejumlah uang yang sudah disepakati diawal tadi.

Seperti telah dipaparkan di bab III, penjual BBM mendapatkan pasokan dengan cara kulak sendiri di SPBU terdekat, ketika pembeli membeli BBM di SPBU baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit

penjual bbm pertamini tidak mendapatkan potongan harga meskipun penjual tersebut akan menjualnya kembali.

Dalam kegiatan jual beli di atas telah sesuai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1457 bahwasanya “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”⁸

Dalam kegiatan transaksi jual beli bbm disini para pihaknya adalah penjual dan pembeli, ada objek yang didapat diserahterimakan, ada penyerahan sejumlah sebagai alat pembayaran dan perjanjian yang mengikat keduanya. Jadi kegiatan jual beli bbm dengan menggunakan mesin pertamini sudah sah menurut undang-undang diatas, yang mana ada penjual dan pembeli, ada objek yang diserahterimakan yaitu bbm baik jenis pertalite maupun pertamax dan ada alat pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati.

Perjanjian yang dimaksud, terdapat penjelasannya dalam KUHPerdata Pasal 1320, empat syarat yang harus terpenuhi, diantaranya:

1. Kesepakatan yang mengikatkan dirinya. Dalam hal ini kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli harus menyetujui perjanjian tanpa adanya paksaan dari keduanya. Praktik jual beli bbm menggunakan mesin pertamini di Kecamatan Kalikotes Kabupaten

⁸ <http://hukum.online.kitab.undang.undang.hukum.perdata.pdf/> diunggah pada 22 Agustus Pukul 14.00 WIB., hlm 218.

Klaten disini secara tidak langsung keduanya sudah bersepakat untuk mengikatkan dirinya, yaitu ketika penjual sudah mencantumkan harga perliternya sebagai perjanjian dan pembeli sudah mengetahui harga dan menyetujuinya.

2. Kecakapan untuk melakukan perikatan. Dalam melakukan sebuah perjanjian kedua belah pihak harus orang yang cakap dalam hukum. Menurut KUHPerdara Pasal 1330 menjelaskan orang yang belum cakap hukum adalah orang yang belum dewasa dan orang yang dalam pengampuan. Dalam praktik jual beli bbm menggunakan mesin pertamini/pom mini disini rata-rata orang yang sudah diatas 18 tahun dan tidak dalam pengampuan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu. Dalam jual beli objek yang diperjualbelikan harus jelas. Dalam kegiatan jual beli bbm yang menggunakan mesin pertamini/ pom mini sudah jelas jenis barang yang dijual beserta harga yang sudah tertera pada mesin pertamini tersebut.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam kegiatan jual beli tidak boleh ada sesuatu yang dilarang baik objeknya maupun perjanjian yang tidak dibenarkan dalam undang-undang. Kegiatan jual beli bm menggunakan mesin pertamini di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten merupakan jual beli barang yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Namun dalam praktik jual beli bbm menggunakan mesin pertamini khususnya di Wilayah Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten mengenai takaran dalam perliternya tidak jelas atau tidak persis satu liter penuh untuk takaran perliternya, baik itu sudah settingan dari mesinnya atau terdapat kesalahan dari mesin tersebut. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Mengenai Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha ayat 1(3)

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”⁹

Bahkan pembeli tidak mengetahui bbm yang dibelinya sudah sesuai takaran atau tidak karena mesin pertamini yang belum ada standart Badan Metrologi legal. Pada dasarnya perlindungan konsumen bertujuan:¹⁰

Bagi Konsumen

1. Meningkatkan kesadaranm kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negative pemakaian barang dan/ atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Edisi Terbaru), Permata Press.,hlm 7.

¹⁰ Masrukin, *Buku Daras (Hukum Perlindungan Konsumen)*, Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2014.,hlm 9.

Bagi Pemerintah

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.

Bagi Pengusaha

1. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
2. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Namun konsumen (pembeli) merupakan orang yang selalu dirugikan dalam praktik jual beli dibandingkan dengan penjual (produsen). Khususnya jual beli bbm menggunakan mesin pertamini/ pom mini khususnya di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten produsen/ penjual melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran atau ketidaksesuaian takaran baik dilakukan oleh penjual maupun pemilik mesin pom mini dengan sengaja mengurangi takaran pada bahan bakar minyak yang dibelinya. Akibatnya hak-hak konsumen (pembeli) tidak terpenuhi. Ketidaksesuaian takaran muncul karena mesin dari pom mini/ pertamini tidak ada standart dari Badan Metrologi Legal, akibatnya takaran yang ada di pertamini/ pom mini berbeda dengan di SPBU/ pertamina.

Kenyataanya kegiatan jual beli bbm menggunakan mesin pertamini di Wilayah Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten tersebut merugikan konsumen (pembeli) karena ketika konsumen (pembeli) sudah memberikan kewajibannya dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu “membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati”¹¹ dengan membayar sejumlah uang ketika membeli bbm, akan tetapi konsumen tidak mendapatkan haknya sebagai pembeli bbm menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 (c) yaitu “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa”¹²

dengan adanya pengurangan takaran baik disengaja maupun tidak disengaja, yang seharusnya pemilik mesin pertamini (pengusaha) selalu mengecek keadaan mesin mengenai takaran bbm tersebut. Agar takaran yang ada pada mesin pertamini/ pom mini selalu pas.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli BBM Menggunakan Mesin Pertamina Digital

Mesin pertamini memang sudah muncul dari beberapa tahun lalu, namun sampai sekarang keberadaan pertamini digital masih banyak digemari masyarakat. Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten dari 5/20

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Edisi Terbaru), Permata Press., hlm 5

¹² Ibid.,

kios pertamini belum memiliki izin, baik izin pendirian kios di tempat tersebut maupun izin dari mesin pertamini tersebut.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi “Setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin pengolahan, dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda paling tinggi Rp.50,000,000,000,00 (lima puluh miliar rupiah).”¹³

Berdasarkan Pertemuan dari pantauan detik.com diikuti sekitar 40 orang dari unsur pengelola SPBU, pemilik usaha Pertamina, paguyuban SPBU, Satpol PP, Polres dan instansi lain di Pemkab. Pertemuan dipimpin Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Pemkab Klaten, Bambang Sigit Sinugroho Pada 4 November 2019, Imam mengatakan sesuai Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM serta Peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2015, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) itu hanya sampai di SPBU. Tidak ada sub SPBU seperti jenis pertamini.¹⁴

Dalam aturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis BBM tertentu terdapat syarat untuk menjadi sub penyalur berdasarkan pasal 6 BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyalur Jenis BBM Tertentu¹⁵, antara lain:

1. Anggota dan/ atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/ atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

¹³ Pasal 53, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁴ Pemda Tolak Pertamina Berdiri di Jateng, Dikutip dari <https://finance.detik.com/energi/d-4771558/pemda-larang-pertamina-berdiri-di-jateng> diakses 5-11-2020.

¹⁵ Pasal 6, BPH Migas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyalur Jenis BBM Tertentu.

2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyalur yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki izin lokasi dan Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur.
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari penyalur berupa stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau pertimbangan lain yang akan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, mengenai takaran pada mesin pertamini tidak terlihat jelas apakah itu sudah pas takarannya atau tidak. Ketidakjelasan takaran pada mesin pertamini diakibatkan karena tidak terlihatnya secara langsung oleh pembeli maupun penjual. Selain itu, patokan takaran pada mesin pertamini tidak berdasarkan aturan legal dari Pemerintah ataupun dari lembaga seperti Badan Metrologi Legal.

Berdasarkan pada tinjauan Hukum Islam, kegiatan mengurangi takaran tidak dibenarkan dalam Islam. Adapun penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu pemahaman dari individu terkhusus pada penjual seharusnya lebih difokuskan bahwasanya dalam berusaha harus bersikap jujur apalagi mengenai kegiatan jual beli dengan jalan benar, dan Allah mensyariatkan bahwasanya dalam kegiatan jual beli antara pedagang dengan pembeli dilakukan dengan suka sama suka (QS. An-Nisa':29).

Apabila manusia melanggar ketentuan tersebut, maka manusia (penjual) akan memperoleh sanksi di akhirat kelak atau bahkan masyarakat yang mengetahuinya secara langsung akan dikucilkan bahkan kios milik masyarakat yang melakukan kecurangan akan sepi.

Berdasarkan aturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 yaitu

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.”¹⁶

Apabila terbukti ada penjual yang tidak melakukan usaha sesuai takaran dan timbangan berdasarkan larangan pasal 8, maka pelaku usaha harus memberikan ganti rugi menurut Pasal 19 (1) UUPK yaitu

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”¹⁷

¹⁶ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Ibid, Pasal 19.

Upaya yang dapat dilakukan ketika penjual tidak melakukan tanggung jawabnya yaitu pengusaha/ penjual berkewajiban memberikan ganti rugi.

Berdasarkan UUPK pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Adapun upaya penyelesaian dalam perlindungan konsumen ada 2 macam, yaitu:

a) Upaya Hukum di Luar Pengadilan

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 47, Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali.¹⁸

Mengenai perkara pelanggaran konsumen yang diselesaikan secara perdata, gugatan dapat dilakukan melalui peradilan atau di luar peradilan. Apabila melalui peradilan, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah lingkungan peradilan. Apabila dilakukan di luar peradilan, maka gugatan dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁹

¹⁸ Pasal 47, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Masrukin, *Buku Daras (Hukum Perlindungan Konsumen)*, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2014, hlm 61.

Pemilihan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan sukarela para pihak yang bersengketa. Jadi tidak ada keharusan penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Selanjutnya, tata cara permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagai berikut:²⁰

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan melalui sekretaris BPSK.

Adapun harus memuat secara benar dan lengkap mengenai: nama dan alamat konsumen/ahli waris/kuasa disertai bukti diri, nama dan alamat lengkap pelaku usaha, barang dan jasa yang diadukan, bukti, keterangan, saksi yang mengetahui, dan foto-foto barang jika ada.

- 2) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dilakukan apabila; konsumen meninggal dunia, sakit/ telah berusia lanjut dan tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti KTP, belum dewasa dan Warga Negara Asing.

²⁰ Ibid.

- 3) Permohonan penyelesaian konsumen dibuat secara tertulis yang diterima oleh sekretaria BPSK diberika bukti tanda terima kepada pemohon.
- 4) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh sekretaria BPSK dalam format yang sudah disediakan dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima.

b) Upaya Hukum Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan atau mengajukan gugatan melalui pengadilan dalam perkara konsumen mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku.

Dalam mengajukan gugatan melalui pengadilan, penggugat dapat menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil. Ganti rugi berdasarkan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa:²¹

- 1) Pengembalian uang dan/ atau
- 2) Perawatan kesehatan dan/ atau
- 3) Pemberian santunan

²¹ Pasal 19, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tata cara mengajukan gugatan melalui pengadilan dalam perkara konsumen mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Dalam hal ini diberlakukan ketentuan dalam pasal 118 H.I.R sebagai berikut:²²

- 1) Gugatan diajukan pada pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat,
- 2) Apabila tergugat terdiri dari dua (2) orang atau lebih, gugatan diajukan di tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat. Jadi penggugat yang menentukan dimana ia mengajukan gugatannya.
- 3) Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat,
- 4) Apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana barang tetap itu terletak.\
- 5) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Pemilihan domisili ini hanya merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada penggugat. Apabila pihak penggugat mau, ia dapat mengajukan gugatan di tempat tinggal tergugat.

Dalam praktiknya, pada perkara tertentu sampai saat ini belum pernah ada/ sedikit konsumen yang mengadakan perkara konsumen ke

²² Masrukin, *Buku Daras (Hukum Perlindungan Konsumen)*, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2014, hlm 64.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Wilayah tertentu (Semarang), oleh karena itu BPSK jaranganya konsumen yang mengadukan perkara konsumen ke BPSK, menurut Gunawan Wibisono karena beberapa kemungkinan sebagai berikut:²³

- 1) Masyarakat (konsumen) belum tahu keberadaan BPSK.
- 2) Konsumen tidak mau repot, artinya konsumen tidak mau membuat konflik dengan pihak lain yang dapat menyita biaya dan tenaganya
- 3) Konsumen berfikir pragmatis, menghitung untung ruginya, artinya perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan ganti rugi yang didapatkan sebanding atau tidak.
- 4) Konsumen sudah mandiri, artinya konsumen sudah mengetahui akan hak dan kewajibannya, Konsumen teliti sebelum membeli, membaca komposisinya (bahan-bahan yang digunakan), indikasinya, masa kadaluarsanya dan sebagainya.

²³ Ibid, hlm 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan dalam penulisan skripsi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis diatas, transaksi jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten menerapkan transaksi jual beli secara langsung dengan perjanjian diawal ketika konsumen membeli sejumlah bbm kepada penjual, kemudian penjual melayani dan pembeli (konsumen) menyerahkan sejumlah uang dari kepada penjual sesuai perjanjian di awal.
2. Berdasarkan analisis Hukum Islam, praktik jual beli bbm menggunakan mesin pertamini di Kecamatan Kalikotes Klaten sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Ada pembeli dan penjual, ada objek yaitu bahan bakar minyak (pertalite dan pertamax) dan alat tukar pembayaran berupa uang yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Akan tetapi ada ketidaksesuaian takaran pertamini/ pom mini baik itu disebabkan karena kesalahan dari mesin itu sendiri maupun dari penjual yang mengurangi takaran, ketidaksesuaian (gharar) tersebut dikategorikan gharar ringan. Sebab ketidaksesuaian yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dipisahkan maka hukumnya boleh . Disisi lain, adanya pertamini dapat membantu masyarakat yang kehabisan bbm dijalan, terburu untuk pergi namun ke SPBU antri dan masyarakat

yang enggan ke SPBU karena jaraknya yang jauh. Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, praktik jual beli bbm menggunakan mesin pertamini digital di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten sudah benar, berdasarkan KUHPdata Pasal 1320 mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti perjanjian yang mengikatkan kedua belah pihak, kecakapan, suatu pokok tertentu (objek) dan alat tukar/pembayaran yang disepakati. Namun dalam hal ini konsumen (pembeli) tidak mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan informasi yang benar, jujur mengenai kondisi barang/jasa tersebut (Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Seharusnya konsumen (pembeli) mendapatkan kerugian atas haknya yang tidak terpenuhi apabila konsumen merasakan dirugikan dalam hal jual beli dengan mesin pertamini.

3. Perlindungan Hukum mengenai konsumen yang tidak mendapatkan haknya dalam hal takaran dapat ditempuh dengan 2 upaya hukum dalam perlindungan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi, yaitu; pertama, upaya hukum diluar pengadilan dengan cara mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke BPSK maupun secara musyawarah antara kedua belah pihak. Kedua, upaya hukum melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan maupun pemberian santunan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penjual untuk selalu berbuat jujur dalam kegiatan jual beli karena pengurangan takaran merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam maupun hukum positif.
2. Diharapkan kepada pembeli (konsumen) agar selalu berhati-hati dalam kegiatan jual beli karena pembeli merupakan pihak yang selalu dirugikan dibandingkan penjual. Pembeli agar lebih teliti dan berhati-hati, ketika pembeli menemukan ketidaksesuaian dalam hal takaran segera menegur penjual agar tidak ada korban yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Agus Suwandono, *Modul 1: Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Buku Materi Pokok BMP: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Terbuka, 2016.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, Cet.I 2018.
- Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007.
- Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008).
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017.
- Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Janus Sidabalok, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, Anggota IKAPI : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Masrukin, *Buku Daras (Hukum Perlindungan Konsumen)*, Fakultas Syariah : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2014.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publlishing, 2013.
- Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah (dalam Pandangan 4 Madzhab)*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014

Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah: Perlindungan Hukum Dan Konsumen*.Tangerang: PSIP Nusantara Press, 2018.

Mustofa, dkk, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2009.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Surakarta: Media Zikir, 2009.

Narbuko, Cholid. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia)*, Bantul:Lintang Rasi Aksara Books, cet. Ke-1.2016.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suwandono.Agus,*Modul 1: Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Buku Materi Pokok BMP: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Terbuka,2016.

Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Dosen Pasca Sarjana: Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2016.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Permata Press.

Jurnal

Desy Ary Setyawati, dkk, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah

Kuala Law Jurnal,(Banda Aceh) Vol.1(3) pp.33-51, 2017.

Hosen. Nadratuzzaman, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal: Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, UIN Jakarta, 2009.

Muhammad Yunus.dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuanganm Syariah Vol.2 No.1, Universitas Islam Bandung: Fakultas Syariah.

Meliana.Safira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 70 Semarang)*, Thesis S1: UIN Walisongo Semarang, 2016.

Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999*, Jurnal IUS: Institut Agama Islam Hamzarwadi (IAIH) NW Lombok Timur, Vol.III No.9, 2015.

Zaenal Arifin dan Thamrin Logowali, *Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Paropo Kota Makassar)*, Jurnal: UIN Alauddin Makassar, Makassar: 2017.

Skripsi

Dika Farizal Utomo, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pertamina Yang Tidak Memiliki Peralatan Penyaluran Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Keselamatan Kerja*, Skripsi, Universitas Jember, Jember: 2018.

Erlin Fatmawati, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Di Wonocolo*, Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019.

Melinda Putri Mulya, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamina Digital Di Desa Sidomulyo, Belitang Oku Timur*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2018.

Irma Sari, *Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim dalam Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Butung Makassar)*, tidak diterbitkan, Program Studi Sarjana Ekonomi UIN Alauddin Makassar, Makassar.

Suci Aini Fatana, *Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya*, tidak diterbitkan, Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum,

UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Internet

Data Kendaraan Bermotor 2017 (<http://Bapenda.jateng.go.id/>) dan Badan Pusat Statistik (<http://Klatenkab.bps.go.id/>) Dilihat 11-6-2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entry/konsumen> (Diakses pada 09 Januari 2020 Pukul 11.36 AM)

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PP%2036%20-%202004.pdf> (Diakses pada 10 Januari 2020 09.46 AM)

<https://hukum.online/kitab.undang.undang.hukum.perdata.pdf> (Diunggah pada 22 Agustus Pukul 14.00 WIB)

Wawancara

Amri, Pembeli BBM, Wawancara, Kalikotes: 10 April 2020 Pukul 15.00 WIB – 15.00 WIB.

Anita Rahmawati, Pembeli BBM, Wawancara, Kalikotes: 10 April 2020 Pukul 14.30 WIB – 15.00 WIB.

Samadi, Pembeli BBM, Wawancara, Kalikotes: 10 April 2020 Pukul 15.25-16.15 WIB

Iwan, Pengelola, Wawancara, 20 April 2020, Kalikotes: 20 April 2020 Pukul 21.00 WIB – 21.45 WIB.

Marni, Penjual BBM Pertamina, Wawancara, Kalikotes: 28 Maret 2020 Pukul 18.30 WIB – 19.40 WIB.

Tatik, Penjual BBM Pertamina, Wawancara, Kalikotes: 20 April 2020 Pukul 12.00 WIB – 12.45 WIB.

Sri Lestari, Penjual BBM Pertamina, Wawancara, Kalikotes: 28 Oktober 2020 Pukul 13.00

Ningsih, Penjual BBM Pertamina, Wawancara, Kalikotes: 28 Oktober 2020 Pukul 13.30

Heriyanto, Penjual BBM Pertamina, Wawancara, Kalikotes: 28 Oktober 2020

Pukul 14.00

Widodo, Penjual Mesin dan Penjual BBM Pertamina, Wawancara, Kalikotes: 22
April 2020 Pukul 13.00 WIB.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 (Biodata Narasumber)

1. Nama : Amri (Pembeli)
 Umur : 22 Tahun
 Alamat : Tambongwetan, Tambongwetan, Kalikotes, Klaten.
2. Nama : Anita (Pembeli)
 Umur : 26 Tahun
 Alamat : Prigi Kulon, Gemblegan, Kalikotes, Klaten.
3. Nama : Samadi
 Umur : 40 Tahun
 Alamat : Prigi Wetan, Jogosetran, Kalikotes, Klaten
4. Nama : Iwan (Pengelola SPBU)
 Umur : 25 Tahun
 Alamat : Kujon, Kalikebo, Klaten
5. Nama : Marni(Penjual BBM Pertamina)
 Umur : 57 Tahun
 Alamat : Tambongwetan, Tambongwetan, Kalikotes, Klaten.
6. Nama : Tatik (Penjual BBM Pertamina)
 Umur : 31 Tahun
 Alamat : Prigi Wetan, Jogosetran, Kalikotes, Klaten
7. Nama : Sri Lestari (Penjual BBM Pertamina)
 Umur : 48 Tahun
 Alamat : Gentongan, Gemblegan, Kalikotes, Klaten

8. Nama : Ningsih (Penjual BBM Pertamina)
Umur : 38 Tahun
Alamat : Tambong Kulon, Kalikotes, Klaten
9. Nama : Heriyanto (Penjual BBM Pertamina)
Umur : 27 Tahun
Alamat : Kalikotes, Kalikotes, Klaten
10. Nama : Widodo (Pemasar Mesin Pertamina)
Umur : 47 Tahun
Alamat : Gejagan, Kalikotes, Klaten

Lampiran 2 (Pedoman Wawancara)

Transkrip Wawancara dengan Penjual BBM Pertamina

1. Sejak kapan ibu memiliki usaha menjual bbm dengan mesin pertamini?

Jawab : (Ibu Tatik) Sudah sekitar 1 tahun yang lalu mbak. (Ibu Marni) Sudah 2 tahun lebih mbak.

2. Apakah awalnya berjualan dengan eceran menggunakan botol ?

Jawab : (Ibu Tatik) awalnya jualan bensin eceran mbak, terus ada yang nawarin bagi hasil dengan jualan bensin pake mesin pertamini. Akhirnya mau mbak. (Ibu Marni) tidak mbak langsung jualan dengan mesin pertamini.

3. Mesin pertamini tersebut milik sendiri atau hanya menjualkan saja?

Jawab : (Ibu Tatik) mesinnya milik Pak Widodo mbak, saya Cuma bantu jual sama listrik saja, nanti bagi hasilnya untuk pemilik mesin 60% dan buat saya 40% sudah sama listrik. (Ibu Marni) mesinnya kemarin beli 14 juta mbak tapi yang 2 *noozle* jadi ditempat saya ada 2 macam jenis bbm, satunya pertalite sama pertamax.

4. Mengenai ijin untuk membuka usaha menjual bbm menggunakan pertamini bagaimana?

Jawab : (Ibu Tatik) enggak pake mbak tinggal pasang mesin aja. (Ibu Marni) tidak memakai ijin mbak tinggal buka usaha aja, lagian tokonya pojok desa mbak jadi ya aman-aman wae.

5. Jika pernah berjualan menggunakan botol eceran, apakah berbeda pembeli tambah banyak atau sama saja?

Jawab : (Ibu Tatik) berbeda mbak biasanya kalo satu jerigen untuk jualan memakai botol bisa dua hari kalo enggak ya tiga hari, tapi kalo pakai mesin 3

jerigen untuk 2 sampe 3 hari kadang enggak sampai. Untuk 1 jerigennya berisi 30 literan mbak. (Ibu Marni)

6. Jika hanya menjualkan saja, berapa keuntungan bagi hasil yang diterima masing-masing?

Jawab : (Ibu Tatik) 60% untuk pemilik mesin, 40% untuk penjual, untuk listrik dari penjual dan bbm sudah disetori dari pemilik mesin.

7. Jika bagi hasil jangka waktu berapa bulan untuk pembagian hasilnya?

Jawab : (Ibu Tatik) dalam jangka waktu setahun mbak, nanti setiap bulan dikumpulin dulu hasil penjualannya dicatat nanti dari jangka waktu setahn dibagi hasilnya.

8. Mengenai pengecekan alat pertamini, apakah selalu dicek dalam jangka waktu tertentu?

Jawab : (Ibu Tatik) tidak selalu dicek hanya saja jika mesin mengalami eror bisa langsung dicek keadaan mesinya, dan untuk pengecekan tarakan dilakukan pada saat penambahan bbm yaitu jangka waktu antara 3-5 hari sekali namun kadang-kadang juga tidak di cek.

9. Jika mesin pertamini dibeli secara langsung, berapa harga untuk alat tersebut?

Jawab : (Ibu Marni) untuk yang 2 selang 24 juta mbak, kalo yang kecil/ 1 selang kemaren sekitar 7 jutaan mbak. Sudah langsung diantarkan.

10. Syarat apa saja yang harus disiapkan untuk dapat memiliki mesin pertamini?

Jawab : (Ibu Marni) tidak ada syarat khusus mbak yang penting mesinnya ditempatkan di tempat yang aman dari hujan dan panas. Kalo enggak yaa

dihindarkan dari panas matahari nanti kalo kehujanan bisa ditutup sementara nunggu reda baru dibuka lagi.

11. Bagaimana cara kerja mesin pertamini tersebut?

Jawab : Ada beberapa tombol terdapat dikios Pertamina yaitu: Tombol A untuk nominal kelipatan Rp.5,000,00

Tombol B untuk nominal kelipatan Rp.10,000,00

Tombol C untuk jumlah literan tertentu

Dan ada beberapa tombol di antaranya angka, * dan #

contohnya : apabila ada yang konsumen membeli bbm Rp.10,000,00 tombol yang pertama di pencet adalah *B# kemudian langsung mengarahkan selang nozzle ke tangki motor konsumen sampai berbunyi “tit” yang menandakan pengisian bbm telah selesai.

12. Apabila mesin eror saat digunakan, bagaimana solusinya?

Jawab : (Ibu Tatik) segera menghubungi pemilik mesin pertamini, (Ibu Marni) menghubungi pihak agen atau tukang service mesin tersebut.

Transkrip Wawancara Untuk Pembeli

1. Apakah mbak pernah membeli BBM di Pertamina/ pom mini?

Jawab : (Anita) pernah mbak

(Amri) pernah mbak

2. Apakah harganya berbeda dengan di SPBU?

Jawab : (Anita) kayaknya selisih seribuan mbak sama di SPBU besar.

Lebih mahal di Pertamina daripada di SPBU. (Amri) lebih mahal Rp.1,000,00 lebih mahal di Pertamina dengan di SPBU mbak.

3. Alasan kenapa memilih membeli BBM di Pertamina/ pom mini dibandingkan di SPBU?

Jawab : (Anita) saya seringnya beli di SPBU sih mbak karena lebih murah tapi kalo keburu-keburu ke tempat kerja ya belinya di Pertamina karena searah dengan tempat kerja. (Amri) jarang mbak kalo enggak kepepet BBMnya mau habis ga beli di Pertamina.

4. Apakah takaran yang ada di pom mini dengan SPBU sama? Apa ada perbedaan ketika membeli di Pertamina dengan SPBU?

Jawab : (Anita) wah kalo perbedaan takaran juga tidak tahu ya mbak karena sistemnya BBM tidak kelihatan karena ada di mesin dan cara pengambilannya dengan selang jadi tidak kelihatan mbak, namun, terkadang kalo beli di Pertamina X dengan Y padahal sama-sama full dan kondisi bensin distrip merah tapi kenapa harga bisa berbeda sampai Rp.5,000,00 mbak padahal sama-sama di Pertamina. (Amri) lebih suka beli di SPBU mbak karena murah, tapi ya pernah juga beli di Pertamina kalo keadaan darurat saja

atau lagi males ke SPBU karena jauh. Kebetulan kuliahnya di Solo jadi jarang kalo beli di pertamini.

5. Apabila berbeda dengan takaran / tidak satu liter pas apakah berani menegur penjual bbm?

Jawab : (Anita) dulu pernah tapi karena penjualnya saya kenal dan sering beli disana berbeda desa tapi mbak, penjualnya untung berapa kalo bagi hasil kata beliau mepet karena hasilnya dari bagi hasil saja, tapi kadang curang kepada pembeli yang lain mengurangi takaran dengan menekan-nekan selang nozzle dengan tujuan yang keluar pada selang tersebut angin bukan bbm nya, Namun yang ditergetkan pembeli hanya yang memakai mobil saja karena tidak kelihatan. Pada saat bapak menyertakan hal tersebut saya kaget dan mengatakan dosa lo om ngono kuwi, dan pemiliknya menjawab “kan sebagian mbak, orang tertentu tok.” “isoh dituntut mengko om jenengan” jawab pemiliknya “ora mbak aku dodolan ket setahun lalu aman kok.”

(Amri) belum pernah nemuin mbak.

6. Seberapa penting, hadirnya pertamini jika SPBU di daerah yang jauh?

Jawab : (Anita) wah kalo SPBU yang sekarang aja udah jauh mbak apalagi yang daerah jimbung bisa lebih jauh lagi. Penting sih kalo ada pertamini di sekitar pemukiman, tapi kadang takut mbak kalo ada kasus kebakaran gara-gara mesin pertamini. (Amri) bisa sangat membantu mbak karena untuk orang-orang yang perginya tidak jauh pasti jika ke SPBU besar juga jauh dan lebih memilih yang terdekat seperti pertamini, bensin eceran menggunakan botol.

Transkrip Wawancara untuk Pengelola SPBU

1. Sudah berapa lama kerja di SPBU?

Jawab : Hampir 5 tahun dek.

2. Apakah ada pembatasan jumlah pembelian untuk jenis pertalite dan pertamax?

Jawab : nek pembatasan beli bbm sih enggak ada dek kalo untuk jenis pertalite sama pertamax. Tapi nek dinggo solar ada pembatasan 30 liter untuk satu kendaraan roda lebih dari empat seperti truck. Bebas beli berapa aja dek.

3. Syarat apa saja yang diperlukan untuk pembelian bbm di SPBU dalam jumlah banyak?

Jawab : yaa bawa jerigen besi deh sebenere dan gaboleh di atas bronjong (keranjang saku kendaraan bermotor) tapi kalo disini tidak ketat aturane dek, tapi kalo di daerah seperti jogja untuk beberapa SPBU harus menggunakan jerigen besi kalo pembelian dalam jumlah banyak. Kalo disini ya tetap dilayani dek.

4. Apabila ada pembelian dengan menggunakan derijen plastik apakah tetap dilayani?

Jawab : tetap dilayani dek malah udah biasa, udah dibilangi pakai jerigen besi tapi tetap masih memakai yang bahan plastik mau gimana lagi dek.

5. Untuk pembelian yang menggunakan derijen rata-rata berapa liter untuk setiap harinya?

Jawab : 70 liter sampai 100an liter ada yang pakai motor jerigen ditaruh bronjong kanan dan kiri, ada yang membawa mobil pick up.

6. Apakah pertamini/ pom mini merupakan bagian dari PT.Pertamina?

Jawab : bukan dek, bukan masuk bagian PT.Pertamini. Mesinnya cara kerjanya juga berbeda.

Transkrip Wawancara Untuk Marketing Mesin Pertamina

1. Apakah mesin yang digunakan Kerjasama bagi hasil merupakan milik pribadi atau hanya sebagai penyalur saja?

Jawab : Alhamdulillah milik pribadi mbak, kebetulan yang jual mesinnya temen saya.

2. Bapak hanya kerjasama bagi hasil saja atau sebagai penjual mesin Pertamina juga?

Jawab : Saya juga jual mesinnya juga mbak.

3. Untuk harga per mesinnya berapa pak?

Jawab : Kalo satu jenis BBM aja kisaran tujuh jutaan mbak, yang dua jenis BBM bisa sampai sebelas jutaan, nanti sudah diantar sekalian dipasangkan mbak.

4. Selain kerjasama bagi hasil di tempat Ibu Tatik ini, dimana saja pak?

Jawab : Ada 4 sih mbak kalo saya, di Genengan, Jogodayoh, Soko sama di Kalikotes sini.

5. Penjualan mesinnya apakah mengalami penurunan pak?

Jawab : Bulan lalu lumayan melonjak mbak, tapi kalo bulan ini sepi lagi. Karena masyarakat juga sudah banyak yang punya mesin Pertamina mbak.

6. Mengenai bagi hasil itu bagaimana sistemnya pak?

Jawab : Jadi nanti saya survei lokasi kira-kira yang ramai di daerah mana setelah survei, saya menawarkan kepada pemilik lokasi untuk kemudian saya ajak kerjasama ini, nanti setelah mau tinggal bagaimana kesepakatannya. Kalo biasanya saya 60% nya dan penjual BBM/ pemilik lokasi 40% nya. Untuk pembagian keuntungannya nanti jangka waktu 6 bulan sekali.

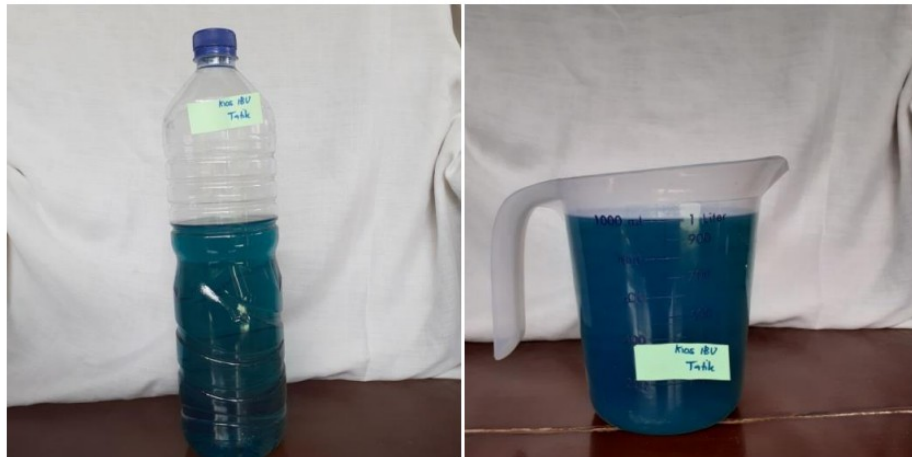
7. Apabila mesin mengalami kerusakan bagaimana pak?

Jawab : Yaa tinggal saya benerin, nanti kalo ganti-ganti alatnya atau selang sampai ganti nozzle nya dari saya. Penjual hanya menjualkan BBM nya saja mbak.

Lampiran 3 (Foto/ Dokumentasi)

1. Foto bersama di Kios Pertamina Ibu Tatik (Penjual BBM)





2. Foto Bersama Ibu Marni (Penjual BBM)





3. Foto Kios Ibu Sri Lestari (Gentongan)



4. Foto Kios Ibu Ningsih (Tambong Kulon)



5. Foto Kios Bapak Heriyanto (Kalikotes)





6. Foto Bersama Mas Iwan (Pengelola SPBU)



7. Lampiran 4 (Tabel Wawancara)

No	Uraian	Bulan 2020							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep
1	Persiapan a. Penyusunan Proposal b. Seminar Proposal								
2	Pelaksanaan penelitian								
3	Pengolahan data								
4	Analisis data								
5	Penulisan laporan								
6	Ujian skripsi								

Lampiran 5 (Daftar Riwayat Hidup)

1. Nama : Indriyah Laili Adkhayati
2. NIM : 162111095
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 17 Nopember 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Prigi Kidul RT03/04, Gemblegan, Kalikotes,
Klaten, Jawa Tengah.
6. Nama Ayah : Budi Murjoko
7. Nama Ibu : Muryati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD N 2 Gemblegan Lulus tahun 2010
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mts) N Mlinjon Lulus tahun 2013
 - c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Klaten Lulus tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Agustus 2020

Penulis,

Indriyah Laili Adkhayati

NIM. 162.111.095